

MAHBUB DARYANTO

**STUDI
KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN
PONDOK PESANTREN**
(EVALUASI KEBIJAKAN DI PROVINSI JAMBI)



MAHBUB DARYANTO

STUDI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN
(EVALUASI KEBIJAKAN DI PROVINSI JAMBI)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



**STUDI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PONDOK
PESANTREN
(EVALUASI KEBIJAKAN DI PROVINSI JAMBI)**



Oleh :

MAHBUB DARYANTO

NIM. 09.3.789/BR

DISERTASI

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Doktor
dalam Bidang Ilmu Agama Islam

YOGYAKARTA

2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

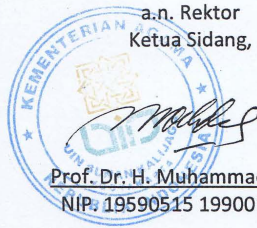
PENGESAHAN

Disertasi berjudul : **STUDI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN (Evaluasi Kebijakan di Provinsi Jambi)**
Ditulis oleh : Drs. H. Mahbub Daryanto, M.Pd.
NIM : 09.3.789/BR

**Telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor
Studi Keislaman**

Yogyakarta, 8 Mei 2017

a.n. Rektor
Ketua Sidang,



Prof. Dr. H. Muhammad, M.Ag.
NIP. 19590515 199001 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL **9 DESEMBER 2016**, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **DRS. H. MAHBUB DARYANTO, M.PdI.** NOMOR INDUK MAHASISWA **09.3.789/BR** LAHIR DI **JAMBI** TANGGAL **24 AGUSTUS 1970**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

~~PUJIAN (CUM LAUDE) / SANGAT MEMUASKAN / MEMUASKAN*~~

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR STUDI KEISLAMAN DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE - 558

YOGYAKARTA, 5 MEI 2017

A.N. REKTOR
KETUA SIDANG,

PROF. DR. H. MUHAMMAD, M.Ag.
NIP. 1959590515 19001 1 002

* CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Disertasi berjudul : **STUDI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN
(Evaluasi Kebijakan di Provinsi Jambi)**

Nama Promovendus : Drs. H. Mahbub Daryanto, M.Pd.
N I M : 09.3.789/BR

Ketua Sidang / Penguji : Prof. Dr. H. Muhammad, M.Ag.

Sekretaris Sidang : Dr. H. Waryono, M.Ag.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Sutrisno, M.Ag.
(Promoto/Penguji)

2. Dr. H. Ahmad Djanan Asifudin, MA.
(Promoto/Penguji)

3. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
(Penguji)

4. Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag.
(Penguji)

5. Dr. Mahmud Arief, M.Ag.
(Penguji)

6. Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA.
(Penguji)

Diujikan di Yogyakarta pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017

Pukul 14.00 s/d selesai

Hasil / Nilai (IPK) 3,38.....

Predikat Kelulusan : Pujian (Cum Laude) / Sangat Memuaskan / Memuaskan



**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Drs. H. Mahbub Daryanto, M.Pd.I.
NIM. : 09.3.789/BR
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

menyatakan bahwa **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, Maret 2017

Saya yang menyatakan,



Drs. H. Mahbub Daryanto, M.Pd.I.
NIM. 09.3.789/BR




KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. H. Sutrisno, M.Ag.

()

Promotor : Dr. H. Ahmad Djanan Asifuddin, MA.

()

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**STUDI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN
(Evaluasi Kebijakan di Provinsi Jambi)**

yang ditulis oleh:

N a m a : Drs. Mahbub Daryanto, M.Pd.I.
NIM : 09.3.789/BR
Program : Doktor (S3) Studi Islam *Program by Research*

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 9 Desember 2016, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Februari 2017

Promotor,



Prof. Dr. H. Sutrisno, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**STUDI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN
(Evaluasi Kebijakan di Provinsi Jambi)**

yang ditulis oleh:

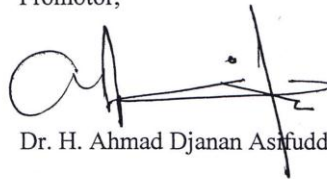
N a m a : Drs. Mahbub Daryanto, M.Pd.I.
NIM : 09.3.789/BR
Program : Doktor (S3) Studi Islam *Program by Research*

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 9 Desember 2016, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Februari 2017

Promotor,



Dr. H. Ahmad Djanan Asrifuddin, MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**STUDI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN
(Evaluasi Kebijakan di Provinsi Jambi)**

yang ditulis oleh:

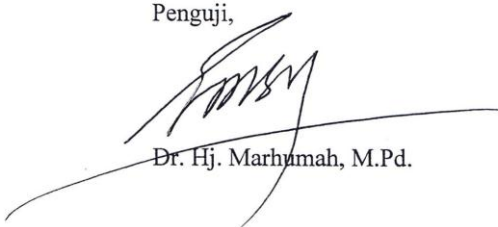
N a m a : Drs. Mahbub Daryanto, M.Pd.I.
N I M : 09.3.789/BR
P r o g r a m : Doktor (S3) Studi Islam *Program by Research*

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 9 Desember 2016, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Februari 2017

Penguji,



Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**STUDI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN
(Evaluasi Kebijakan di Provinsi Jambi)**

yang ditulis oleh:

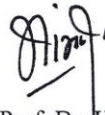
N a m a : Drs. Mahbub Daryanto, M.Pd.I.
NIM : 09.3.789/BR
Program : Doktor (S3) Studi Islam *Program by Research*

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 9 Desember 2016, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Februari 2017

Penguji,



Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**STUDI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN
(Evaluasi Kebijakan di Provinsi Jambi)**

yang ditulis oleh:

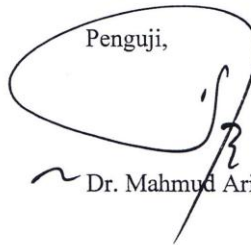
N a m a : Drs. Mahbub Daryanto, M.Pd.I.
NIM : 09.3.789/BR
Program : Doktor (S3) Studi Islam *Program by Research*

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 9 Desember 2016, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Februari 2017

Penguji,



Dr. Mahmud Arief, M.Ag.

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa perhatian pemerintah terhadap perkembangan pondok pesantren di Indonesia semakin besar, terutama sejak reformasi pendidikan nasional tahun 2003. Hal tersebut memberi pengaruh terhadap perkembangan pondok pesantren dari segi akses, mutu dan tata kelola. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik melakukan studi evaluasi kebijakan pemerintah terhadap perkembangan pondok pesantren di Provinsi Jambi.

Permasalahan dibatasi dalam rumusan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah perkembangan pondok pesantren di Provinsi Jambi? (2) Bagaimanakah kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan pondok pesantren di Provinsi Jambi? (3) Apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan pondok pesantren di Provinsi Jambi?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, melalui studi deskriptif, eksploratif, eksplanatif, analitis dan evaluatif. Data penelitian bersumber dari sumber pustaka berupa dokumen tentang kebijakan pemerintah dalam pengembangan pondok pesantren, dan sumber lapangan berupa fenomena perkembangan pondok pesantren di Provinsi Jambi. Data lapangan diperoleh baik melalui dokumen, wawancara maupun observasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Perkembangan pondok pesantren di Provinsi Jambi telah berlangsung sejak awal abad ke-20 yang ditandai dengan berdirinya Pondok Pesantren Nurul Iman di Kota Jambi pada tahun 1915. Hingga kini, perkembangan jumlah pesantren telah menjadi 214 lembaga. Berbeda dengan pola pendirian pesantren di Pulau Jawa, keunggulan pondok pesantren pada tahap awal-awal berdiri di Provinsi Jambi pada umumnya adalah pesantren milik masyarakat yang diserahkan kepemimpinannya kepada seorang tokoh tuan Guru, kiyai sebagai representasi dari masyarakat yang diberikan otoritas dan wewenang mengatur pesantren tersebut, artinya implementasi pendidikan dari

masyarakat diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dengan pola demikian, maka kepemimpinan pesantren di Jambi tidak bersifat turun-temurun. Hal ini pada satu sisi perkembangannya terdapat kelemahan pada aspek regenerasi pengasuh pondok pesantren. Pola itu mengalami perubahan dengan kehadiran alumni-alumni pesantren dari Pulau Jawa untuk mendirikan pesantren di Jambi, terutama sejak tahun 1990-an.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan pondok pesantren di Provinsi Jambi difokuskan pada pengembangan sarana dan prasarana pondok pesantren, yang ditandai dengan sejumlah bantuan yang mengalir baik dari Kementerian Agama RI, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi bahkan memiliki program Pesantren Mandiri untuk pemberdayaan pondok pesantren. Dari segi program, Kementerian Agama fokus pada pengembangan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) 12 Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah, dan Program Indonesia Pintar. Selain itu, Kementerian Agama memiliki kebijakan pengembangan pesantren sebagai pusat *tafaqquh fiddin* sesuai dengan tradisi keilmuan yang dikembangkan sejak awal keberadaannya. Hal tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan MQK Tingkat Nasional pada tahun 2013, dengan motivasi awal pengembangan kitab kuning bagi pondok pesantren di Provinsi Jambi. Akan tetapi kebijakan tersebut mengalami hambatan pada tingkat implementasi kebijakan diakibatkan kurangnya program terkait *tafaqquh fiddin* yang terencana setiap tahun.

Kekuatan kebijakan pemerintah dalam pengembangan pondok pesantren di Provinsi Jambi adalah adanya kerjasama koordinatif antara Kementerian Agama dengan Pemerintah Daerah, sehingga dapat melakukan sinkronisasi program dalam pengembangan pondok pesantren. Kerjasama itu terus terpelihara dengan diselenggarakannya kegiatan Halaqah setiap tahun, sehingga terjadi pertemuan-pertemuan yang signifikan bagi upaya koordinasi antar Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan SKPD Provinsi Jambi. Kelemahannya terletak pada pemetaan potensi dan kondisi

pondok pesantren di Provinsi Jambi, sehingga program pengembangan yang ada belum dilakukan berdasarkan skala kebutuhan di masing-masing pondok pesantren. Namun demikian, secara umum, kelemahan itu bersumber dari masih terbatasnya anggaran pengembangan pondok pesantren di Kementerian Agama, yang hingga kini masih harus berbagi dengan madrasah (MI, MTs, dan MA), Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (PAIS), Madrasah Diniyah Takmiliah, Pendidikan Al-Qur'an, dan Perguruan Tinggi Islam.

Berdasarkan temuan penelitian, penulis merekomendasikan agar pemerintah lebih memperkuat fokus pengembangan pondok pesantren sebagai lembaga tafaqquh fiddin, lebih dari upaya pengembangan budaya dan seni, keterampilan, dan teknologi. Hal ini demi menjaga pondok pesantren dari arus globalisasi yang dapat mengancam tradisi pondok pesantren.

ABSTRACT

This research is based on the fact that the government's attention to the development of Islamic boarding schools in Indonesia is getting bigger, especially since the national education reform in 2003. It gives the effect to the development of the boarding schools in terms of access, quality and governance. Dealing with this, the author is interested in conducting a study on evaluation of the government policies towards the development of boarding schools in the Jambi Province.

The problem is focused on the following formula: (1) How is the development of boarding schools in Jambi Province? (2) How is the policy of the Government and the Local Government in the development of Islamic boarding schools in Jambi Province? (3) What are the strengths and weaknesses of the policy of the Government and Local Government in the development of Islamic boarding schools in Jambi Province?

This study used a qualitative approach, through the descriptive, explorative, *eksplanatif*, analytic and evaluative study. The data source was from published sources, included documents about government policy in the development of the boarding schools, and field sources, in the form of phenomena of the development of the boarding schools in the Jambi Province. The field data was obtained through documents, interviews and observations.

Based on the research findings, it can be concluded that the development of the boarding school in Jambi Province has been started since the beginning of the 20th century, that were marked by the establishment of *Pondok Pesantren Nurul Iman* in Jambi in 1915. Up to now, the development of the number of schools has reached 214 institutions. In contrast to the pattern of the establishment of boarding schools in Java, in general the excellence of the boarding schools in the early stages of their stand in Jambi Province is a boarding school belongs to the community that handed over their leadership to a figure of master teacher, chaplain (*kiyai*) as a representation of the people who are given the authority and the

authorization to regulate the *pesantren*(Islamic boarding schools),meaning the implementation of public education was organized from the community, by the community and for the community. Using such patterns, the leadership of boarding schools in Jambi is not hereditary. On one side of its development, there are weaknesses in the regeneration aspects of the educator in charge of the boarding school. As time goes by, that pattern changed with the presence of alumni of *pesantren* from Java to establish schools in Jambi, especially since the 1990s.

Government policies in developing Islamic boarding school in Jambi is focused on the development of facilities and infrastructure boarding school, which is characterized by a number of aid flowing both from the Ministry of Religious Affairs, Ministry of Religious Affairs Office of Jambi Province, and the Provincial Government of Jambi. Provincial Government of Jambi even have programs called *Pesantren Mandiri* (independent *pesantren*)in order to empower the Islamic boarding schools. In terms of the program, the Ministry of Religious Affairs focused on the development of Compulsory Basic Education program (*Wajardikdas*) 12 Years at *Pondok Pesantren Salafiyah* and *Indonesia Pintar* program. Besides, the Ministry of Religious Affairs has a policy of *pesantren* development as centers of *tafaqquh fiddin*, in accordance with scientific tradition which was developed from the beginning of its existence. Then, it is realized by the implementation of MQK in its national level in 2013, with the initial motivation for the development of the *kitab kuning* (yellow book) for the boarding schools in the province of Jambi. However, these policies come into resistance at the level of policy implementation due to the lack of related programs of *tafaqquh fiddin* planned every year.

The strength of the government policy in the development of Islamic boarding schools in Jambi province is the existence of coordinating cooperation between the Ministry of Religious Affairs and Local Government, so that it can synchronize programs for the boarding school development. The cooperation is constantly well-maintained by convening *Halaqah* activity every year, resulting in

significant meetings for the co-ordination within the Regional Office of the Ministry of Religion with the SKPD Jambi Province. Its weakness lies in mapping the potency and the condition of the boarding schools in the Jambi Province. As a result, the existing development program is not done yet based on the scope of need in each boarding schools. However, in general, the weakness comes from the limited budget of the development of the boarding school in the Ministry of Religious Affairs, which is up to now still to be shared with the *madrasah* (MI, MTs, and MA), Islamic Religious Education in Schools (PAIS), *Madrasah Diniyah Takmiliyah*, *Pendidikan Al-Qur'an* and Islamic Universities.

Based on those findings, the author recommends that the government should further strengthen the focus of the development of the Islamic boarding schools as an *tafaquh fiddin* institution, over efforts to develop culture and arts, skills, and technologies. This is meant in order to maintain the boarding schools from the globalization that could threaten the tradition of Islamic boarding school.

ملخص البحث

هذا البحث قائم على الواقع الذي يبين أن الحكومة يهتم كثيرا بتطور المعاهد الإسلامية في إندونيسيا، وخاصة منذ عصر إصلاح التعليم الوطني للعام ٢٠٠٣، والأمر الذي يؤدي المعاهد الإسلامية إلى التطور من ناحية الوصول والجودة والحوكمة. فوجد الكاتب نفسه تميل إلى دراسة تقييمية لسياسة الحكومة في تطور المعاهد الإسلامية في محافظة جامبي (Jambi).

تقتصر المشكلة على الأمور التالية: (١) كيف تتطور المعاهد الإسلامية في محافظة جامبي؟ (٢) ما الذي تقوم به الحكومة الرئيسية والمحلية في تطوير المعاهد الإسلامية في محافظة جامبي؟ (٣) ما هي نقاط القوة والضعف في سياسة الحكومة الرئيسية والمحلية في تطوير المعاهد الإسلامية في محافظة جامبي؟

وتم تطبيق المنهج الكيفي في هذا البحث عن طريق الدراسة الوصفية، والاستكشافية، والتفسيرية والتحليلية والتقييمية. أما بيانات البحث فأخذت من المصادر المكتبية، وهي وثائق عن سياسة الحكومة في تطوير المعهد الإسلامي، وكما أخذت البيانات من المصادر الميدانية في شكل ظاهرة تطور المعهد الإسلامي في محافظة جامبي. والبيانات الميدانية تم الحصول عليها من خلال الوثائق والمقابلات والملاحظات.

وتوصل هذا البحث إلى أن تطور المعاهد الإسلامية في محافظة جامبي قد استمر منذ بداية القرن الـ ٢٠ مع إنشاء معهد نور الإيمان الإسلامي بجامبي في عام ١٩١٥. والآن، قد بلغ عدد المعهد الإسلامي إلى ٢١٤. وعلى النقيض من نمط تأسيس المعهد الإسلامي في جزيرة جاوا، كانت المعاهد الإسلامية في جامبي في مراحلها المبكرة تأسسها المجتمع ثم سلمها لمعلم الدين أو أحد العلماء، ممثلاً للمجتمع، ولديه السلطة لتنظيم المعاهد الإسلامية، ومعنى هذا إن التعليم جاء من المجتمع وتم تنفيذه من قبل المجتمع ولأجل المجتمع. فإن قيادة المعاهد الإسلامية في جامبي ليست وراثية. ومن ناحية التطور، كان هذا الأمر يكمن نقطة الضعف التي تتمثل في إعداد الشخص المناسب لإدارة المعهد. وكان هذا النمط يتغير مع وجود خريجي المعاهد الإسلامية من جاوا وبدءوا بإنشاء معاهد إسلامية في جامبي، وخاصة منذ عام التسعينات في القرن الماضي.

إن سياسة الحكومة في تطوير المعاهد الإسلامية في جامبي تتركز على تطوير المرافق والبنية التحتية لمعاهد إسلامية، فتدفقت المساعدات من كل من وزارة الشؤون الدينية، والمكتب الإقليمي لوزارة الشؤون الدينية في جامبي، والحكومة المحلية لمحافظة جامبي. والحكومة المحلية لمحافظة جامبي أطلقت برنامج المعهد الإسلامي المستقل، لأجل تمكين المعاهد الإسلامية. ومن ناحية البرنامج، فتركز وزارة الشؤون الدينية على تطوير برنامج التعليم الإزلامي حتى سن ١٢

في برنامج المعاهد الإسلامية السلفية وبرنامج إندونيسيا الذكية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن وزارة الشؤون الدينية لديها سياسة لتطوير المعهد الإسلامي كمركز للتفقه في الدين وفقا للتقاليد العلمية التي وضعت منذ بداية وجودها. ويتحقق ذلك عن طريق المسابقة لقراءة الكتب على المستوى الوطني في عام ٢٠١٣، وكان الدافع الأول لهذه المسابقة تطوير الكتب الصفراء أو الكتب القديمة للمعاهد الإسلامية في محافظة جامبي. ومع ذلك، إن هذه السياسة تأتي في ظل عقبات عند مستوى التنفيذ، ويرجع ذلك إلى عدم وجود برنامج التفقه في الدين المخطط سنويا.

وقوة سياسة الحكومة في تطوير المعاهد الإسلامية في محافظة جامبي تكمن في التعاون والتنسيق بين وزارة الشؤون الدينية والحكومة المحلية، بحيث يمكن لهما مزامنة البرنامج لتطوير المعاهد الإسلامية. ويتم احتفاظ هذا التعاون باستمرار بوجود الحلقات كل عام، مما يؤدي إلى اجتماعات هامة للتنسيق بين المكتب الإقليمي لوزارة الشؤون الدينية ووحدات العمل في محافظة جامبي. وضعف هذه السياسة يكمن في رسم إمكانيات وظروف المعاهد الإسلامية في محافظة جامبي، ولذلك فإن البرامج الموجودة بشأن تطوير المعهد لم يتم تنفيذها جيدا في كل من المعاهد الإسلامية. ومع ذلك، فإن هذا الضعف عموما يأتي من ميزانية محدودة لتطوير المعهد، لأن وزارة الشؤون الدينية في وقت واحد لا تزال تركز المدارس الإسلامية من الابتدائية

والمتوسطة والثانوية، والتعليم الإسلامي في المدارس العامة، والمدرسة الدينية التكميلية، والكتّاب، والجامعات الإسلامية.

واستناداً إلى نتائج البحث، أوصى الباحث إلى أن تقوم الحكومة بتعزيز التركيز على تطوير المعهد الإسلامي باعتباره مؤسسة للتفقه في الدين، ولا تتوقف على الجهود لتطوير الثقافة والفنون والمهارات والتقنيات. وذلك لأجل تحصين المعهد الإسلامي من العولمة التي يمكن أن تهدد المعهد الإسلامي.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan disertai berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha

ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَقِّدِينَ	ditulis	muta’ aqqidīn
عِدَّةً	ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutoh

1. Bila dimatikan ditulis h

هِبَةٌ	ditulis	hibbah
حِزْبِيَّةٌ	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Aran yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

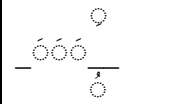
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	karāmah al-auliya
--------------------------	---------	-------------------

2. Bila ta’ marbutoh hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah di tulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

	kasrah	ditulis	i
	fathah	ditulis	a
	dhammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya’ mati	ditulis	ā
يَسْعَى	ditulis	yas’ā

kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (e/-)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	zawī al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. berkat rahmat dan inayah-Nya, disertasi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan manusia dan pendayagunaan potensi-potensi ilmiahnya.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian disertasi ini tidak luput dari bantuan dan dorongan banyak pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang mendalam kepada :

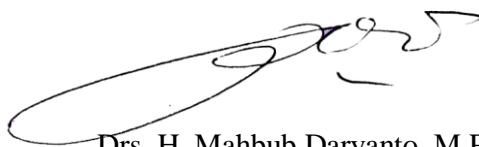
1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi jenjang Doktor (S3) di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Direktur, dan Dr. Moch. Nur Ichwan, MA., selaku Ketua Program Doktor, dan seluruh civitas akademika Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, atas bimbingan, arahan, bantuan, pemberian fasilitas, dan pelayanannya, kemudahan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan disertasi ini.
3. Prof. Dr. H. Sutrisno, M.Ag., dan Dr. H. Ahmad Djanan Asifuddin, MA. selaku Promotor walaupun dalam kesibukan beliau berdua dengan penuh semangat dan bersahabat telah memberikan bimbingan, arahan, dorongan, dan masukan dalam penulisan disertasi, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag., dan Dr. Mahmud Arief, M.Ag., selaku penguji yang telah memberikan banyak masukan dan perbaikan demi kesempurnaan penulisan disertasi ini.
5. Bapak-Ibu dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bimbingan untuk menyelesaikan program S3 *by research* ini.

6. Ayahanda H. Muhammad Tabrani Kasma (Alm.) dan Ibunda Hj. Dahniar Umar (Almh.) yang selama hidupnya selalu memberikan dukungan moril kepada penulis. Disertasi ini penulis persembahkan kepada keduanya sebagai bagian dari bakti seorang anak.
7. Isteriku tersayang Hj. Nurcahaya, S.Ag., M.Pd.I., dan anak-anakku terkasih M. Iqbal Alif Utama, M. Haikal Ramdhan, dan Almira Aisya Mahbub, jika sekiranya ada ungkapan melebihi ucapan terima kasih, maka itulah yang dapat penulis haturkan sebagai ungkapan atas pengertian, kesabaran, dukungan moril dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.

Atas jasa dan segala amal mereka yang telah diberikan kepada penulis, semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. Penulis sadari sepenuhnya, bahwa disertasi ini jauh dari sempurna, tidak terlepas dari kekurangan serta kelemahan. Kritik yang konstruktif, sumbang dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan disertasi ini. Akhirnya semoga disertasi ini dapat berguna bagi kita semua.

Jambi, Maret 2017

Penulis,



Drs. H. Mahbub Daryanto, M.Pd.I

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan.....	ii
Yudisium.....	iii
Dewan Penguji.....	iv
Pernyataan Keaslian dan Bebas Plagiarisme	v
Pengesahan Promotor.....	vi
Nota Dinas.....	vii
Abstrak.....	xii
Transliterasi.....	xxii
Kata Pengantar.....	xxv
Daftar Isi.....	xxvii
Daftar Tabel.....	xxix
Daftar Gambar.....	xxx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Urgensi Penelitian	13
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Landasan Teori	19
1. Evaluasi Kebijakan.....	19
2. Pondok Pesantren	59
F. Metode Penelitian.....	65
G. Sistematika Penulisan.....	73
BAB II PERKEMBANGAN PONDOK PESANTREN DI PROVINSI JAMBI.....	75
A. Perkembangan Pondok Pesantren di Nusantara.....	75
B. Setting Sosial Politik Perkembangan Pondok Pesantren di Provinsi Jambi.....	83
C. Perkembangan Pondok Pesantren di Jambi.....	89
1. Cikal Bakal Pondok Pesantren di Provinsi Jambi	89

2.	Profil Pondok Pesantren di Provinsi Jambi	93
3.	Kurikulum Pondok Pesantren di Provinsi Jambi	99
4.	Tradisi Keulamaan Pondok Pesantren di Provinsi Jambi	102
5.	Karakteristik Perkembangan Pondok Pesantren di Provinsi Jambi	116
BAB III	KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN	121
A.	Perkembangan Kebijakan dari Masa ke Masa	121
B.	Kebijakan Kementerian Agama	139
C.	Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi.....	160
BAB IV	EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN	169
A.	Hasil Kebijakan pada Kementerian Agama	169
B.	Hasil Kebijakan pada Pemerintah Provinsi Jambi.....	181
C.	Analisis Proses Kebijakan	186
D.	Kekuatan dan Kelemahan.....	199
E.	Evaluasi	214
BAB V	PENUTUP.....	233
A.	Kesimpulan.....	233
B.	Rekomendasi	235
C.	Kata Penutup	236
DAFTAR PUSTAKA		237
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Concept Map Teori Evaluasi Kebijakan	56
Tabel 2.1	Perkembangan Pesantren Berdasarkan Tahun Berdirinya.....	98
Tabel 2.2	Perkembangan Pondok Pesantren di Jambi Periode 1995-2015	99
Tabel 2.3	Daftar kitab produksi pesantren di Provinsi Jambi	113
Tabel 4.1	Fokus Kunci dan Sasaran Kebijakan Kanwil Kemenag Provinsi Jambi	190
Tabel 4.2	Sasaran dan Strategi Kebijakan Kanwil Kemenag Provinsi Jambi	193
Tabel 4.3	Fokus Kunci dan Sasaran Kebijakan Kanwil Kemenag Provinsi Jambi	215
Tabel 4.4	Matriks Evaluasi Kebijakan Pengembangan Pondok Pesantren di Provinsi Jambi.....	266

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Problem-Centered Policy Analysis versi William N. Dunn.....	28
Gambar 1.2	Policy Failures versi Weimer dan Vining	30
Gambar 1.3	Model Analisis Kebijakan versi Weimer dan Vining.....	31
Gambar 1.4	Proses Kontinum Evaluasi Kebijakan.....	32
Gambar 1.5	Paradigma Teknokratik versi Edward S. Quade	34
Gambar 1.6	Paradigma Demokratik Hank C. Jenkins-Smith	36
Gambar 1.7	Conceptual Map Studi Kebijakan	37
Gambar 1.8	Operasionalisasi Evaluasi Implementasi Kebijakan	47
Gambar 3.1	Pembagian Pengelolaan Pendidikan Antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Agama	138
Gambar 3.2	Tata Nilai dan Tema Pembangunan Pendidikan Islam.....	146
Gambar 4.1	Alur Penyusunan Renstra.....	189

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang khas Indonesia, yang lahir bersamaan dengan proses perkembangan Islam di negeri ini. Setelah sejumlah fase pemerintahan dengan berbagai bentuk kebijakan di bidang pendidikan, pondok pesantren tetap bertahan sebagai perwakilan murni aspirasi masyarakat Islam di bidang pengembangan pendidikan, sehingga mengakar kuat menjadi simbol tradisional pendidikan Islam di Indonesia.¹

Atas dasar itulah, Abdurrahman Wahid menyebut pondok pesantren sebagai sub-kultur masyarakat Indonesia, karena keberhasilannya dalam membangun dan mengembangkan suatu sistem budaya tersendiri. Sistem budaya itu tidak hanya dicirikan dengan ciri-ciri fisik seperti adanya kiyai, santri, masjid, asrama dan kitab kuning, tetapi juga dicirikan dengan adanya lingkungan budaya, tradisi, dan nilai-nilai kepesantrenan. Kuatnya sistem budaya itu mengakar di masyarakat, sehingga ia menjadi tak terpisahkan dari keseluruhan sistem budaya masyarakat Indonesia, bahkan menjadi warna dasar wajah masyarakat Islam Indonesia. Maka tak heran jika Clifford Geertz menjadikan unsur pesantren sebagai salah satu pertimbangan dasar dalam membuat klasifikasi sosial masyarakat Islam di Indonesia (Jawa), yang terdiri dari kelas santri, abangan dan priyai.²

Menurut Abdurrahman Wahid, ada tiga peran inti yang melekat pada pondok pesantren terkait dengan kedudukannya sebagai sub sistem budaya, yaitu: (1) pondok pesantren sebagai pusat kegiatan

¹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi Modernisasi Menuju Millenium*, Jakarta: Logos, 1999, v

² Abdurrahman Wahid, "Pendidikan Islam harus Beragam", dalam *Kedaulatan Rakyat*, 27 Desember 2002, 4

belajar masyarakat (*centre of community learning*), (2) pondok pesantren sebagai agen pembaharuan yang memperkenalkan gagasan pembangunan pedesaan (*agent of rural development*), dan (3) pondok pesantren sebagai wadah penyebaran nilai-nilai Islam murni dari generasi ke generasi.³

Muhammad Zuhdi, dalam sebuah publikasi internasional, menyatakan bahwa Kesepakatan Tiga Menteri Tahun 1975 yang memungkinkan pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dalam bentuk madrasah/sekolah merupakan sebuah langkah positif dalam mengakomodasi pondok pesantren sebagai bagian dari lembaga pendidikan modern, sehingga tidak lagi menempatkan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional yang berseberangan dengan ide-ide modernisasi.⁴

Sepanjang sejarah Islam di Indonesia, pondok pesantren dapat dikatakan sebagai salah satu sumbangan umat Islam bagi kemajuan bangsa Indonesia. Pada awal berdirinya, pondok pesantren menjadi daya pendorong terciptanya masyarakat belajar di Indonesia, sehingga berkembang menjadi kiblat ilmu pengetahuan. Pada masa penjajahan, pondok pesantren menjadi basis kekuatan budaya perlawanan dalam mempertahankan hak-hak dasar kedaulatan bangsa. Di era kemerdekaan, pondok pesantren menjadi agen penggerak transformasi sosial. Pada masa pembangunan hingga memasuki era reformasi, pondok pesantren meneguhkan diri menjadi benteng pertahanan spiritualitas bangsa. Pada masa perkembangan saat ini, pondok pesantren diharapkan menjadi ujung tombak dalam mempertahankan moralitas bangsa dari dampak-dampak modernisasi global.

³ *Ibid.*

⁴ Muhammad Zuhdi, "The 1975 Three-Minister Decree of The Modernization of Indonesian Islamic Schools", dalam *American Educational History Journal*, Vol. 32, No. 1, 2005, 36-41

Ciri awal pesantren itu sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman saat itu. Oleh sebab itu, pada zaman kolonialisme Barat, pesantren menjadi benteng pertahanan umat Islam sekaligus menjadi basis perlawanan terhadap penjajahan. Karena perkembangan itu pula, maka pesantren sejak awal berdirinya telah menjadi lembaga pendidikan yang berada dalam posisi berseberangan dengan pemerintah (Hindia-Belanda). Khusus di dunia pendidikan, pesantren pun tumbuh menjadi simbol lembaga pendidikan tradisional yang berbeda haluan dengan sistem pendidikan modern sebagaimana diperkenalkan oleh pemerintah Belanda melalui sekolah umum.⁵

Menurut Karel Steenbrink, pondok pesantren pada masa penjajahan merupakan lembaga pendidikan berbasis masyarakat dan menjadi tumpuan harapan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi keagamaan dan politiknya. Sebaliknya, pemerintah saat itu memposisikan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang tidak masuk dalam prioritas pembangunan, karena materi pembelajarannya terlalu terpaku dengan pendidikan agama saja, dengan sedikit perhatian terhadap sains dan teknologi. Perkembangan tersebut menandai awal dualisme sistem pendidikan di Indonesia. Steenbrink memandang bahwa hal tersebut merupakan desain politik yang disengaja, dengan maksud agar umat Islam Indonesia terkotak menjadi dua kubu yang selalu berseberangan. Satu kubu memahami sains dan teknologi, namun tidak memiliki pemahaman agama yang baik. Sebaliknya, kubu kedua memahami agama secara baik, namun tidak mengerti tentang sains dan teknologi. Dengan desain tersebut, maka umat Islam Indonesia akan terkotak menjadi kubu sekuler dan kubu tradisional, yang sulit disatukan.⁶

⁵ Agus Syafi'i, *Pesantren: Dulu dan Sekarang*, Jakarta: Mubarak Institute, 2006, 7

⁶ Steenbrink, Karel A. dan Abdurrahman, *Pesantren, Madrasah, Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994, 7

Desain politik kolonialis itu ternyata bertahan hingga masa kemerdekaan Indonesia, dengan tetap bertahannya dikotomi antara pendidikan agama (Islam) di madrasah dan pendidikan umum di sekolah hingga sekarang. Menurut Steenbrink, desain itu seperti sengaja dipertahankan, dengan maksud mengisolasi perkembangan umat Islam, agar memisahkan antara ahli agama di satu kubu dan ahli ilmu umum di kubu lain. Artinya, jika umat Islam masuk ke pendidikan umum yang diakui pemerintah, maka ia tidak akan mendapatkan bekal pendidikan agama yang mumpuni. Sebaliknya, jika bertahan dengan lembaga pendidikan agama Islam seperti pesantren, maka ia tidak akan mendapatkan bekal pengetahuan sains dan teknologi yang cukup untuk persaingan global.⁷

Dalam situasi perkembangan demikian, pesantren pun tumbuh menjadi lembaga pendidikan yang cenderung anti terhadap hal-hal berbau Barat, mulai dari mode pakaian, perilaku, hingga kurikulum, metode pendidikan. Maka santri pun terdidik untuk tidak menggunakan sepatu, jas, dan dasi; terdidik pula untuk tidak bergaul dengan lawan jenis dengan memisahkan asrama putra dan putri; serta tidak diajarkan materi sains dan teknologi serta bahasa-bahasa Eropa-Barat.⁸

Situasi itulah yang menjadi latar belakang munculnya dualisme pendidikan di Indonesia. Perkembangan tersebut berdampak pada persoalan umum pendidikan di Indonesia, yaitu dualisme pendidikan antara agama dan umum. Pondok pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan Islam umumnya kurang memperhatikan materi-materi pendidikan umum yang seharusnya menjadi bekal dari untuk bersaing di era globalisasi. Sebaliknya, lembaga-lembaga pendidikan

⁷ *Ibid.*, 6

⁸ M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Cet. ke-3, 240-241

umum kurang memperhatikan pendidikan agama yang berdampak pada krisis spiritulitas lulusannya.⁹

Sesungguhnya, dualisme itu telah berupaya dihapuskan. Sejak awal kemerdekaan, kalangan Islam terus berupaya memperjuangkan masuknya pondok pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pada awal kemerdekaan, ketika perdebatan mengenai sistem pendidikan mana yang akan dijadikan sebagai sistem pendidikan nasional, pesantren disebut-sebut sebagai alternatif sistem pendidikan nasional. Meskipun akhirnya gagal, sistem pendidikan pesantren setidaknya diakui eksistensinya. Maklumat BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) tertanggal 22 Desember 1945 misalnya menganjurkan bahwa: “dalam memajukan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya diusahakan agar pengajaran di langgar, surau, masjid, dan madrasah berjalan terns dan ditingkatkan”.¹⁰

Pada tanggal 27 Desember 1945, sebagai tindak lanjut dari maklumat di atas, BPKNIP menyarankan agar madrasah dan pondok pesantren mendapatkan perhatian dan bantuan materiil dari pemerintah, karena madrasah dan pondok pesantren pada hakekatnya adalah salah satu nilai dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berakar dalam masyarakat Indonesia pada umunnya.¹¹

Selama masa Orde Lama dan Orde Baru, kedudukan pondok pesantren mengalami pasang surut. Namun memasuki era Reformasi, pondok pesantren telah mendapat tempat yang kuat dalam Sistem Pendidikan Nasional. Undang.-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan jelas mengamanahkan bahwa pendidikan keagamaan dan

⁹ Muh. Said dan Junimar Affan, *Mendidik dari Zaman ke Zaman*, (Bandung: Jemmars, 1987), 52-53

¹⁰ Depag RI, *Pedoman Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Tahun 2004-2009*, Jakarta: Ditjen Bagais, 2004, 7

¹¹ *Ibid.*, 7

pesantren merupakan bagian integral sistem pendidikan nasional. Sejak saat itu pula perhatian pemerintah semakin besar terhadap pendidikan pesantren, baik dalam bentuk kebijakan pendidikan maupun bantuan material untuk mendukung dan memajukan program-program pesantren.¹²

Pondok pesantren kembali menemukan momentum relevansinya yang cukup besar dalam era otonomi daerah, untuk memainkan kiprahnya sebagai elemen penting dalam proses perubahan sosial. Terlebih lagi, otonomi mengandalkan kemandirian tiap-tiap daerah dalam mengatur rumah tangga daerahnya sendiri berdasarkan kemampuan daerah, dengan menggali potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.

Sehubungan dengan itu, maka pemerintah daerah pun dituntut perhatiannya terhadap pesantren, dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan dan tuntutan pengembangan pendidikan keagamaan bagi masyarakat di daerah masing-masing. Keberadaan pendidikan keagamaan menjadi partner yang ideal bagi pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan yang ada di daerah sebagai basis bagi pelaksanaan transformasi sosial, melalui penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudi luhur. Maka dari itu, segenap elemen masyarakat memiliki fungsi organis untuk sama-sama menjadi roda penggerak pembangunan daerah menuju terciptanya sebuah transformasi sosial, termasuk melalui pendidikan keagamaan di pondok pesantren.

Perhatian pemerintah terhadap pesantren menjadi langkah strategis pembangunan bangsa mengingat kekuatan modal kultural yang luar biasa yang dimiliki pondok pesantren, yaitu:

- a. Pesantren mengakar kuat di masyarakat karena ia lahir, tumbuh, dan berkembang dari dan untuk masyarakat.

¹² Depag RI, *Dinamika Pondok Pesantren di Indonesia*, Jakarta: Dit Pekapontren, 2005, 4

Keadaan ini menyebabkan pesantren lebih mencerminkan suatu gerakan akar rumput (*grass root*).

- b. Rasa kepemilikan (*sense of belonging*) dan tanggung jawab (*sense of responsibility*) masyarakat terhadap pesantren sangat tinggi. Hal ini menjadi faktor penting untuk menjamin *sustainability* (kelangsungan) pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mandiri.
- c. Pesantren memiliki tingkat kemandirian yang sangat tinggi, dan sangat responsif terhadap perubahan.
- d. Jaringan pondok pesantren sangat kuat dan luas, sehingga memiliki basis konstituen yang solid di masyarakat.
- e. Pesantren merupakan lembaga penjaga moral-etik (*moral guardian*) bagi masyarakat.
- f. Pesantren adalah mediator masyarakat dan negara dalam kerangka pengembangan masyarakat madani (*civil society*).
- g. Dukungan dana yang memadai dari masyarakat sebagai sumber pengelolaan lembaga pendidikan pesantren.¹³

Dengan segala modal kultural tersebut, pondok pesantren dikukuhkan dalam PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, sebagai satuan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.¹⁴

Sejak saat ini, sejumlah kebijakan pengembangan pondok pesantren oleh pemerintah digulirkan, baik pada level nasional maupun daerah/provinsi. Pada tahap inilah, penulis tertarik

¹³ Depag RI, *Pedoman Pengembangan Pesantren...*, 10-11

¹⁴ *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Pasal 26, ayat (1)

melakukan penelitian tentang kebijakan pemerintah terkait dengan upaya pengembangan pondok pesantren, dengan fokus studi di Provinsi Jambi. Dalam hal ini, ada dua level kebijakan yang diteliti, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama RI telah menggulirkan sejumlah program kependidikan. Salah satunya adalah masuknya program pendidikan formal di pondok pesantren. Jika pada masa-masa sebelumnya, pesantren hanya diberikan dua pilihan antara mengadopsi sistem pendidikan formal dalam bentuk madrasah atau sekolah, atau berdiri sendiri di luar sistem pendidikan nasional. Dua pilihan tersebut menghadapkan pondok pesantren pada dua dilema yang sama-sama berat. Jika mengadopsi sistem pendidikan formal, berarti pesantren harus menyediakan alokasi waktu tersendiri untuk penyelenggaraan pendidikan formal yang dengan sendirinya mengurangi alokasi waktu untuk pendidikan murni pesantren (salafiyah). Sebaliknya, jika menolak mengadopsi pendidikan formal, dan bertahan dengan pendidikan salafiyahnya, maka lulusannya tidak akan mendapatkan pengakuan formal dari pemerintah.

Melalui reformasi pendidikan, pesantren mendapatkan pilihan ketiga, yaitu menyelenggarakan program Wajib Belajar Sembilan Tahun Pendidikan Dasar (wajardikdas) 9 Tahun pada pondok pesantren. Kelebihan program tersebut dibandingkan dengan mengadopsi pendidikan formal adalah bahwa program Wajardikdas pada pondok pesantren tidak membutuhkan alokasi waktu sebanyak pendidikan formal, dan pesantren penyelenggara dapat dengan leluasa mengatur sendiri proses pembelajarannya. Hal tersebut berdampak positif bagi kedudukan pondok pesantren dalam sistem pendidikan nasional, karena telah terhindar dari diskriminasi pendidikan yang terjadi sebelum reformasi pendidikan tahun 2003. Bahkan dengan program Wajardikdas pada Pondok Pesantren Salafiyah itu, pondok pesantren berhak mendapat dana Bantuan

Operasional Sekolah sebagaimana diperoleh Sekolah dan Madrasah dengan nama BOS Salafiyah.¹⁵

Selain itu, pemerintah juga memasukkan program pendidikan kecakapan hidup (PKH) ke pondok pesantren. Program yang mengadopsi konsep life skills itu dicanangkan sebagai program strategis dalam rangka pengentasan dua permasalahan nasional, yaitu: kemiskinan dan pengangguran. PKH diharapkan menjadi salah satu solusi yang efektif dalam mengatasi dua permasalahan tersebut, dengan cara mendidik dan melatih warga masyarakat agar menguasai bidang-bidang keterampilan tertentu sesuai dengan kebutuhan, peluang, dan tuntutan lapangan pekerjaan. Selain ditujukan bagi warga masyarakat putus sekolah, pengangguran, dan warga miskin, program itu juga dicanangkan agar menjadi materi pembelajaran yang integral dengan kurikulum nasional, sehingga dapat diberikan kepada seluruh santri. Melalui program ini, pesantren yang mendapatkan cap sebagai lembaga pendidikan sarungan selama pra-reformasi, diharapkan dapat memodernisasi pendidikan untuk menjawab tantangan dunia kerja.

Hingga tahap perkembangannya saat ini, perhatian pemerintah pada pondok pesantren semakin meningkat. Selain program Wajardikdas, BOS Salafiyah, dan Life Skills, pemerintah telah melaksanakan sejumlah program nasional untuk pengembangan pesantren, seperti: Pos Kesehatan Pondok Pesantren (POSKESTREN), Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB), Pendidikan Terpadu untuk Anak Harapan (DIKTERAPAN), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Selain itu juga diselenggarakan even-even nasional dalam rangka peningkatan citra pondok pesantren, seperti: Pekan Olahraga dan Seni Pesantren Nasional (POSPENAS), Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK), dan Pekan Pramuka Santri Nusantara (PPSN).

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah pada Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2015*, Jakarta: Ditjen Pendis, 2015

Melalui program-program tersebut, pesantren telah mendapatkan perhatian yang semestinya dari pemerintah, sebagaimana diperoleh satuan-satuan pendidikan yang diakui oleh pemerintah. Namun demikian, program-program tersebut masih tetap meninggalkan dilema terkait dengan transformasi pesantren dari lembaga yang mandiri menjadi lembaga yang berada di bawah pembinaan pemerintah. Pada tingkat permukaan, dilema tersebut muncul pada tarik-menarik antara mempertahankan cita pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis kitab kuning dengan tuntutan menerapkan pendidikan formal sesuai dengan tuntutan nasional dan global. Pada kenyataannya, tidak sedikit pondok pesantren saat ini yang terseret dalam arus modernisasi yang kesulitan dalam mempertahankan cita tradisionalnya sebagai pencetak generasi ulama. Hal ini terutama teramati dari mayoritas pesantren yang mengadopsi pendidikan formal dalam bentuk madrasah (MI, MTs, MA), yang secara perlahan mengikis perhatiannya dalam mengembangkan pembelajaran kitab kuning.

Menghadapi hal tersebut, Kementerian Agama selaku penanggung jawab pembinaan pondok pesantren telah mengambil langkah strategis dengan meluncurkan program Diniyah Formal. Program tersebut dicanangkan sebagai satuan pendidikan yang kurikulumnya ditentukan oleh Kementerian Agama dengan bahan ajar bahasa Arab (kitab kuning) yang diakui setara dengan madrasah dan sekolah. Meskipun program tersebut telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, namun belum berlaku efektif hingga saat ini. Sesungguhnya, solusi ini dapat menjadi solusi terbaik bagi pondok pesantren selain melalui program Mu'adalah, namun masih mengalami kelemahan mendasar terkait dengan persyaratan penyelenggaraan program tersebut yang hanya dapat diakses oleh beberapa pondok pesantren saja di Indonesia.¹⁶

¹⁶ Ditpontren, "PDF Solusi Kelembagaan Permanen untuk Kaderisasi Ulama", dalam <http://ditdpontren.kemenag.go.id/berita>.

Selain program-program tersebut, Kementerian Agama juga menyediakan anggaran bantuan untuk pesantren, seperti bantuan insentif guru pesantren, bantuan S1 santri/ustadz pesantren, program kerjasama beasiswa kuliah di luar negeri, bantuan operasional pesantren, dan sejumlah bantuan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas belajar, asrama, dan MCK, bantuan pembangunan pos kesehatan pondok pesantren, pembangunan perpustakaan, bantuan meubelair, bantuan sarana/prasarana perbengkelan dan life skills, bantuan kitab kuning, bantuan bahan ajar pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren, bantuan pemagangan santri, dan bantuan mesin jahit.¹⁷

Sementara Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah menggulirkan program Pesantren Mandiri, dengan kebijakan melaksanakan program-program untuk mendukung dan mendorong kemandirian pondok pesantren. Dalam hal ini, terdapat 14 dinas/instansi yang terlibat, yaitu Biro Keuangan, Biro Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat (Kesramas), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Perindag), Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi/UKM, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans), Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, dan Badan Pangan.

Program bantuan yang digulirkan meliputi: beasiswa, bantuan dana operasional, pengadaan komputer, pembangunan ruang kelas belajar, bantuan bibit ikan, bantuan pakan ikan, perbaikan wadah budidaya, bantuan konveksi dan bengkel, bantuan bibit sayuran dan buah-buahan, bantuan pos kesehatan pesantren dan bantuan perkebunan.

Program-program tersebut di atas merupakan manifestasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Kementerian Agama mengacu pada

¹⁷ Hasil wawancara Kabid Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, Agustus 2015

Rencana Strategis (Renstra) 5 Tahun. Sedangkan Pemerintah Daerah mengacu pada hasil studi Balitbangda.

Sehubungan dengan itu, penelitian ditujukan pada sejauh mana rencana kebijakan ditetapkan berdasarkan studi yang komprehensif terhadap kebutuhan pengembangan pondok pesantren dan sejauh mana kebijakan tersebut tertuang dalam bentuk program-program yang efektif bagi pengembangan 214 lembaga pondok pesantren yang ada di Provinsi Jambi.

Secara teoritis, studi kebijakan dilakukan dengan menelaah pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan pilihan kebijakan yang tidak ditempuh oleh pemerintah. Terkait dengan program-program pengembangan pesantren yang telah ditempuh oleh pemerintah, maka analisis dilakukan antara lain dengan menelaah latar belakang pengambilan kebijakan, tujuan pengambilan kebijakan, dan efektivitas kebijakan tersebut dalam mengembangkan pondok pesantren.

Atas dasar itu, penulis menetapkan judul penelitian “Studi Kebijakan Pengembangan Pondok Pesantren (Evaluasi Kebijakan di Provinsi Jambi).

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi dalam lingkup analisis kebijakan pengembangan pondok pesantren di Indonesia. Permasalahan difokuskan pada kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan pondok pesantren. Batasan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan pondok pesantren di Provinsi Jambi?
2. Bagaimanakah kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan pondok pesantren di Provinsi Jambi?
3. Apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan pondok pesantren di Provinsi Jambi?

C. Tujuan dan Urgensi Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengungkap pengembangan pondok pesantren di Provinsi Jambi.
- b. Mengungkap kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan pondok pesantren di Provinsi Jambi.
- c. Mengungkap kekuatan dan kelemahan kebijakan yang telah diambil Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan pondok pesantren di Provinsi Jambi.

2. Urgensi

Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka menganalisis perkembangan pondok pesantren Provinsi Jambi dalam konteks kebijakan pemerintah terhadap pondok pesantren dalam skala nasional dan lokal. Dalam hal ini, analisis dilakukan untuk mengungkap setting agenda kebijakan, formula kebijakan, regulasi dan implementasi kebijakan, serta efektivitas kebijakan tersebut terhadap pengembangan pondok pesantren. Dengan mengungkap hal-hal tersebut, maka dapat diketahui sejauh mana keseriusan pemerintah dalam mengembangkan pondok pesantren, dan persepsi pemerintah terhadap kedudukan pondok pesantren dalam sistem pendidikan nasional.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah terhadap sejumlah kepustakaan, penulis menemukan sejumlah karya pustaka sebagai berikut:

1. Fadly Mart Gultom, *Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap kebijakan pengelolaan pendidikan keagamaan Islam, termasuk di dalamnya pondok pesantren berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam.*

Tesis ini dilakukan dengan menggunakan teori penelitian kebijakan (*policy research*) yang lazim digunakan untuk menghasilkan kebijakan dan untuk menelaah kebijakan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan wawancara. Adapun teknik analisis dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menganalisis rumusan-rumusan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007.

Berdasarkan penelitiannya, Gultom menyimpulkan bahwa rumusan kebijakan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 belum ideal untuk pengembangan pondok pesantren, karena belum menyentuh aspirasi pondok pesantren itu sendiri. Dari perspektif analisis kebijakan, peraturan tersebut lebih sebagai upaya pemerintah melindungi kepentingan pemerintah untuk memasukkan program-programnya ke pesantren.¹⁸

2. Supriadin, Politik Pendidikan Islam di Indonesia: Analisis Sistem Pendidikan Pesantren dan Madrasah. Kajian ini mengurai realitas pendidikan pesantren dan madrasah; bagaimana sistem pendidikannya dan bagaimana pula kebijakan pemerintah terhadap dua lembaga pendidikan Islam tersebut. Sistem pendidikan pesantren menunjukkan sifat dan bentuk yang berbeda dari pola pendidikan nasional. Maka pesantren menghadapi dilema untuk mengintegrasikan sistem pendidikan yang dimiliki dengan sistem pendidikan nasional. Sementara itu, kelahiran madrasah merupakan upaya strategis untuk mengintegrasikan pola pendidikan Islam ala pesantren dengan pola pendidikan modern (ala Barat). Intervensi kebijakan/politik berpengaruh terhadap eksistensi pesantren

¹⁸ Fadly Mart Gultom, "Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia (Studi tentang PP Nomor 55 Tahun 2007)", *Tesis*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014

dan madrasah. Pesantren dan madrasah diniyah sebagai sumber pendidikan dan pencerdasan masyarakat Indonesia yang sudah berurat-akar sejak sebelum kemerdekaan baru mendapatkan pengakuan secara yuridis pada era reformasi.

Berdasarkan penelitiannya, Supriadin berkesimpulan bahwa peran dan keberadaan pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan asli Indonesia memang harus tetap dilestarikan dan diperhatikan perkembangannya, karena kehadiran pondok pesantren di tengah-tengah masyarakat adalah selain untuk memberdayakan masyarakat juga sebagai wadah untuk menyiapkan kader-kader Ulama yang mampu menguasai dan memahami al-Qur'an dan Hadis secara baik dan benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pesantren dan madrasah mengalami perkembangan pada masa orde baru dan reformasi dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pendidikan umum dan pesantren secara setara, sebagai upaya menghilangkan dualisme pendidikan di Indonesia.¹⁹

3. Diah Yuli Sugiarti, *Strategi Pengembangan Pondok Pesantren dalam Membangun Peradaban Muslim di Indonesia*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan pesantren di Indonesia yang memiliki berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Pesantren di Indonesia memiliki kondisi yang menguntungkan sehingga mendukung kebijakan yang agresif (*Growth Oriented Strategy*). Maka ketika ada gagasan menjadikan pesantren sebagai pusat peradaban di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Untuk mewujudkannya tentu

¹⁹ Supriadin, "Politik Pendidikan Islam di Indonesia: Analisis Sistem Pendidikan Pesantren dan Madrasah", dalam jurnal *El-HiKMAH*, Vol. 8, No. 2, Desember 2014

dibutuhkan strategi umum (*Grand Strategy*) yang meliputi: (1) Memahami landasan dan konsep kebangkitan; (2) Merumuskan kembali tujuan pesantren; (3) Membenahi sistem pendidikan pesantren; (4) Meningkatkan manajemen pesantren; (5) Meningkatkan kompetensi output pesantren; (6) Refungsionalisasi pesantren; (7) Membangun mitra kerjasama ke luar; (8) Meningkatkan peran pesantren; (9) Modernisasi dalam teknologi, informasi dan komunikasi; dan (10) Program unggulan di era globalisasi.

Sugiarti berkesimpulan bahwa tersusunnya *grand strategy* pesantren berimplikasi pada pengembangan pesantren untuk menjadi pusat peradaban muslim di Indonesia.

Untuk itu, pemerintah khususnya Kementerian Agama diharapkan memberikan bantuan dan kemudahan bagi pengembangan pesantren. Karena tujuan pengembangan pesantren adalah untuk membangun peradaban muslim di Indonesia yang menunjang perbaikan di setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia maka diharapkan semua pihak baik tokoh, masyarakat, pendidik, ekonom serta elit politik dan pemerintah agar memberikan dukungan, kerjasama, dan berpartisipasi dengan kemampuannya masing-masing.²⁰

4. Charlene Tan, *Educative Tradition and Islamic Schools in Indonesia* (Nanyang Technological University, Singapore). Menurut Tan, sekolah-sekolah Islam yang merupakan sebuah tradisi kependidikan sesungguhnya adalah upaya memadukan antara nilai-nilai keagamaan dengan pengetahuan modern. Artikel yang dimuat di *Journal of Arabic and Islamic Studies* ini berupaya membuktikan hipotesis tersebut melalui sekolah-sekolah Islam yang ada

²⁰ Diah Yuli Sugiarti, "Strategi Pengembangan Pondok Pesantren dalam Membangun Peradaban Muslim di Indonesia", dalam jurnal *Edukasi*, Vol. 3, No. 1, Maret 2011:8 – 37

di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut dapat dibuktikan dari tiga fakta. Pertama, sebagian besar sekolah Islam di Indonesia menerapkan materi pelajaran yang bersumber dari ajaran agama Islam dan sumber-sumber sekolah. Kedua, semakin banyak sekolah Islam yang sudah menerapkan sistem pendidikan pedagogi, dan tidak lagi sebatas menghafal. Ketiga, sebagian besar sekolah Islam di Indonesia telah mengembangkan sejumlah kegiatan pembelajaran, antara lain life skills, kepemimpinan, dan keterampilan-keterampilan praktis lainnya.

Fakta-fakta tersebut ditemukan Tan berdasarkan studinya terhadap perkembangan pembelajaran Islam di Indonesia sejak awal masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13. Tan melakukan studi terhadap awal perkembangan pendidikan Islam itu yang dimulai di masjid, rumah guru, hingga berkembang menjadi tempat-tempat mengaji seperti di Surau, Dayah, Pondok Pesantren, dan Madrasah.

Hingga perkembangannya saat ini, menurut Tan, pendidikan Islam menghadapi tantangan untuk memasukkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam ke dalam materi-materi pelajaran yang sudah mengadopsi kurikulum sekuler-modern.

Terhadap pandangan bahwa pendidikan Islam, khususnya pesantren yang mengajarkan doktrin jihad sebagai basis terorisme, Tan berpandangan bahwa pandangan tersebut tidak terbukti. Berdasarkan studinya terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia, Tan berkesimpulan bahwa sebagian besar lembaga pendidikan Islam di Indonesia benar-benar merupakan lembaga pendidikan dan bukan lembaga indoktrinasi.²¹

²¹ Charlene Tan, "Educative Tradition and Islamic Schools in Indonesia", dalam *Journal of Arabic and Islamic Studies* (Nanyang Technological University, Singapore), Vol. 14 (2014), 47-62

5. Ronlad A. Lukens-Bull, *Teaching Islamic Education: Javanese Islamic Education in A Globalizing Era*. Peneliti yang berasal dari University of North Florida itu meneliti tentang bagaimana masyarakat muslim Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dalam menghadapi dampak globalisasi melalui pendidikan. Ia menyebut pesantren sebagai lembaga kunci dalam menjawab tantangan tersebut. Kurikulum pesantren merupakan jawaban terhadap semua tantangan globalisasi. Dengan membentuk kurikulum sendiri, pimpinan pesantren mencoba membentuk pemimpin masa depan Indonesia. Tujuannya adalah untuk membentuk pelajar yang sepenuhnya modern, sepenuhnya berwawasan global, sepenuhnya Indonesia, dan sepenuhnya Islam. Dalam proses tersebut, terjadi pembauran antara modernitas dan tradisionalisme.

Ronlad A. Lukens-Bull menyebut pesantren sebagai lembaga pendidikan *hybrid*, karena berupa memadukan antara tuntutan pendidikan agama di satu sisi dan pendidikan sekuler berbasis sains dan teknologi di lain pihak. Lebih dari itu, pesantren menempatkan moralitas sebagai fokus pendidikan utamanya yang menjadikannya secara ciri khas yang membedakannya dengan madrasah. Melalui kekhasan pondok pesantren itulah, umat Islam Indonesia mampu menjawab tantangan globalisasi dengan cara yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara Islam lain di dunia²²

²² Ronald A. Lukens-Bull, "Teaching Islamic Education: Javanese Islamic Education in A Globalizing Era", dalam *Journal of Arabic and Islamic Studies* 3, 2000, 43

E. Landasan Teori

1. Evaluasi Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan berasal dari kata “bijak”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “bijak” adalah: (1) selalu menggunakan akal budinya; pandai; mahir; (2) pandai bercakap-cakap; petah lidah. Adapun kata “kebijakan” berarti: (1) kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; (2) rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.²³

Di dalam penggunaannya, istilah kebijakan itu biasa disandingkan dengan kata lain, seperti:

- Kebijakan akrobatik berarti: kebijakan yang bertentangan 180 derajat satu sama lain dalam sekejap.
- Kebijakan ekonomi berarti: kebijakan suatu pemerintah untuk mengatur dan mengawasi pertumbuhan dan aktivitas ekonomi dalam negaranya.
- Kebijakan kebudayaan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar rencana atau aktivitas suatu negara untuk mengembangkan kebudayaan bangsanya.
- Kebijakan kependudukan berarti: kebijakan suatu pemerintah untuk mengatur dan mengawasi pertumbuhan dan dinamika penduduk dalam negaranya.
- Kebijakan militer berarti: kebijakan suatu pemerintah yang menyangkut strategi dan struktur angkatan

²³ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, dalam <http://kbbi.web.id/bijak>

bersenjata.

- Kebijakan moneter berarti: (1) semua tindakan pemerintah, bank-bank sentral, dan otoritas publik yang lain yang mempengaruhi kuantitas kredit bank; (2) keputusan bank sentral mengenai penawaran uang agar ekonomi dapat tumbuh lebih cepat, antara lain, dengan memberikan kredit lebih banyak pada sistem perbankan melalui operasi pasar terbuka atas dengan menurunkan persyaratan cadangan dari sistem perbankan.
- Kebijakan pendidikan berarti: kebijakan suatu pemerintah untuk mengatur pendidikan dalam negaranya.
- Kebijakan politik berarti: konsep resmi yang menjadi landasan perilaku politik Negara.²⁴

Sementara di dalam web *Pengertian Ahli* disebutkan bahwa kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak.²⁵

Sementara di dalam Wikipedia Indonesiadisebutkan: “Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.”²⁶ Di dalam Wikipedia Berbahasa Inggris disebutkan: “*A policy is a statement of intent, and is*

²⁴ Ibid.

²⁵ <http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html>

²⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>

*implemented as a procedure or protocol.*²⁷

Selanjutnya dijelaskan bahwa kebijakan pada umumnya digunakan oleh suatu badan atau pengurus dalam suatu organisasi, di mana suatu prosedur atau protokol diterapkan dan dikembangkan oleh para eksekutif. Kebijakan tersebut dapat membantu dalam pembuatan keputusan, baik yang bersifat subjektif maupun objektif. Keputusan subjektif digunakan oleh pihak manajemen sehubungan dengan hal-hal yang tidak terukur secara objektif, seperti keputusan tentang perilaku kerja dan pertimbangan pegawai/karyawan. Sedangkan kebijakan objektif berkenaan dengan regulasi yang bersifat natural, seperti kebijakan tentang seragam pegawai dan sebagainya.²⁸

Perbedaan antara kebijakan dan kebijaksanaan adalah bahwa kebijakan (policy) adalah prinsip-prinsip dasar yang diputuskan untuk menjadi acuan pada tahap pelaksanaan. Sedangkan kebijaksanaan (wisdom) adalah pengambilan keputusan pada tahap pelaksanaan yang didasarkan pada kebijakan. Terkait dengan hal tersebut, Inu Kencana Syafie mengartikan kebijaksanaan sebagai kearifan, yaitu pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang.²⁹

Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Clarke E. Cochran dkk tentang kebijakan publik (public policy) bahwa kebijakan publik selalu merujuk pada segala tindakan pemerintah dan maksud-maksud dari tindakan tersebut. (*the term public policy always refers to the actions of government and the*

²⁷ <https://en.wikipedia.org/wiki/Policy>

²⁸ Ibid.

²⁹ <http://www.masbied.com/2011/08/15/definisi-kebijakan-publik>

intentions that determine those actions).Selanjutnya, Clarke E Cochran dan Eloise F. Malone mengemukakan bahwa kebijakan publik terdiri dari keputusan-keputusan politik untuk menerapkan program-program yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan kemasyarakatan (*public policy consists of political decisions for implementing programs to achieve societal goals*).³⁰

b. Studi Kebijakan

Studi kebijakan sebagai sebuah kegiatan keilmuan mulai dikenal sejak tahun 1951, ketika Daniel Lerner dan Harold D. Laswell menerbitkan buku berjudul *The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Method*. Istilah itu semakin dikenal luas berkat dua tulisan Harold D. Laswell. Pertama, tulisannya yang berjudul *Policy Sciences* dimuat sebagai salah satu entri dalam *International Encyclopedia of Social Sciences* Edisi Tahun 1969. Kedua, ia menulis buku dengan judul yang sama yang terbit pada 1970. Pada bagian awal bukunya, Laswell memulai dengan bab yang berjudul *The Emerging Conception of Policy Sciences* yang menandakan lahirnya ilmu baru yang disebut *policy sciences*.³¹

Istilah tersebut diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi ilmu kebijakan atau lebih populer dengan sebutan analisis kebijakan. Ilmu tersebut pada awalnya banyak dikembangkan dalam lingkup Ilmu Administrasi Negara. Akan tetapi, karena banyak meminjam teori-teori dari ilmu-ilmu sosial, seperti: sosiologi, ekonomi, politik, dan psikologi, maka ilmu itu pun berkembang menjadi bagian tak

³⁰ Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, 5

³¹ Harold D. Laswell, *Policy Sciences*, Connecticut: American Elsevier, 1970, 3

terpisah dari ilmu-ilmu sosial pada umumnya (multidisipliner).

Adapun yang dimaksud kebijakan di sini adalah kebijakan publik. Thomas R. Dye mengartikan kebijakan publik adalah apa pun yang diputuskan oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya.³²

Sementara James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan dan aparat pemerintah yang berwenang, dengan tujuan tertentu, mengenai suatu wacana tindakan atau perbuatan yang harus ditaati seseorang atau sekelompok orang atau semua yang berkaitan dengan kepentingan umum.³³

Definisi ini mengimplikasikan empat hal. Pertama, kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh badan/aparat pemerintah yang berwenang dalam mengambil keputusan tersebut. Kedua, kebijakan publik memuat ketentuan yang harus dilakukan/ditaati. Ketiga, kebijakan publik ditetapkan berdasarkan tujuan tertentu. Keempat, kebijakan publik harus berkaitan dengan kepentingan umum.

Menurut James Anderson, dalam menetapkan suatu kebijakan publik, maka harus ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Perumusan masalah (*problem formulation*): Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
- b. Perumusan kebijakan (*policyformulation*): Bagaimana mengembangkan alternatif-alternatif untuk memecahkan

³² Thomas Dye, *Understanding Public Policy*, Paris: Lavoisier, 2013, cet. Ke-13, 1

³³ James E. Anderson, *Public Policymaking*, Texas: Wadsworth Publishing, 2010, cet. Ke-7, 3

masalah? Siapa saja yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan?

- c. Penetapan kebijakan (*policy adoption*): Bagaimana alternatif ditetapkan? Kondisi-kondisi apa saja yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
- d. Penerapan kebijakan (*policy implementation*): Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa saja tugasnya? Apa dampak dari kebijakan tersebut?
- e. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*): Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?³⁴

Sedangkan Michael Howlet dan M. Ramesh menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- b. Perumusan kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c. Pengambilan keputusan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- e. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses

³⁴ Anderson, *Public Policymaking*, 23-24

untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.³⁵

Aspek-aspek yang terkait dengan kebijakan publik itulah yang menjadi objek dalam analisis kebijakan. Dalam hal ini, analisis kebijakan setidaknya mensyaratkan lima komponen kegiatan, yang meliputi:

- a. Perumusan masalah, yaitu kegiatan awal dalam menganalisis suatu kebijakan dari aspek kelemahan dan kekuatannya. Maka ditetapkanlah poin-poin masalah yang akan menjadi objek analisis.
- b. Peramalan, yaitu kegiatan meramal atau memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang dapat ditimbulkan dari kebijakan tersebut, dibandingkan dengan alternatif-alternatif kebijakan lain.
- c. Rekomendasi, yaitu kegiatan menawarkan suatu kebijakan alternatif setelah menghasilkan memetakan kemungkinan masalah yang terkandung dari suatu kebijakan.
- d. Pemantauan, yaitu kegiatan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan suatu kebijakan dari segi kekuatan dan kelemahannya.
- e. Evaluasi, yaitu mengevaluasi efektivitas suatu kebijakan, yang hasilnya merupakan bahan untuk analisis kebijakan selanjutnya.³⁶

Menurut Harold D. Laswell, analisis kebijakan memerlukan kemampuan untuk memetakan seluruh proses sosial yang melingkupi suatu kebijakan yang akan dianalisis. Sasaran utamanya mencakup lima hal, yaitu:

- a. klarifikasitujuan (*goal clarification*);

³⁵ Michael Howlet dan M. Ramesh, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*, Oxford: Oxford University Press, 2009, cet. Ke-3, 11

³⁶ Howlet dan M. Ramesh, *Studying Public Policy*, 11

- b. pemaparan kecenderungan (*trend description*);
- c. analisis kondisi (*analysis of conditions*);
- d. proyeksi perkembangan masa depan (*projection of future developments*); dan
- e. masukan, evaluasi dan pemilihan alternatif (*invention, evaluation and selection of alternatives*).³⁷

Menurut Mudjia Rahardjo, analisis kebijakan dapat dikenal dalam dua kelompok permasalahan. Kelompok permasalahan pertama meliputi:

- a. Kajian tentang bagaimana, mengapa, dan apa pengaruh yang timbul dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah.
- b. Kajian tentang apa yang dilakukan pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan perbedaan-perbedaan apa yang timbul karenanya.
- c. Kajian tentang sifat dasar, sebab-sebab, dan akibat kebijakan publik.³⁸

Kelompok permasalahan kedua meliputi:

- a. Kajian tentang bagaimana problem-problem dan isu-isu disusun dan dirumuskan.
- b. Kajian tentang bagaimana suatu kebijakan ditempatkan dalam agenda politik.
- c. Kajian tentang bagaimana pilihan-pilihan kebijakan muncul.
- d. Kajian tentang bagaimana dan mengapa pemerintah melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- e. Kajian tentang dampak-dampak kebijakan pemerintah.³⁹

Berdasarkan pengelompokan masalah tersebut, menurut

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Mudjia Rahardjo, "Pengantar Analisis Kebijakan Pendidikan", *Materi Kuliah UIN Malang*, dalam <http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id>, 1 Februari 2010

³⁹ *Ibid.*

Mudjia Rahardjo, pilihan-pilihan harus dibuat berkenaan dengan kebijakan dan program, serta pengaruhnya terhadap usaha implementasi yang mengikuti. Selanjutnya, pilihan-pilihan harus dibuat berkenaan dengan strategi implementasi dan konsekuensinya terhadap penyaluran program. Selanjutnya dipertanyakan siapa yang memetik keuntungan. Pilihan-pilihan itu dibuat berkenaan dengan alokasi sumber dan konsekuensinya terhadap masyarakat.⁴⁰

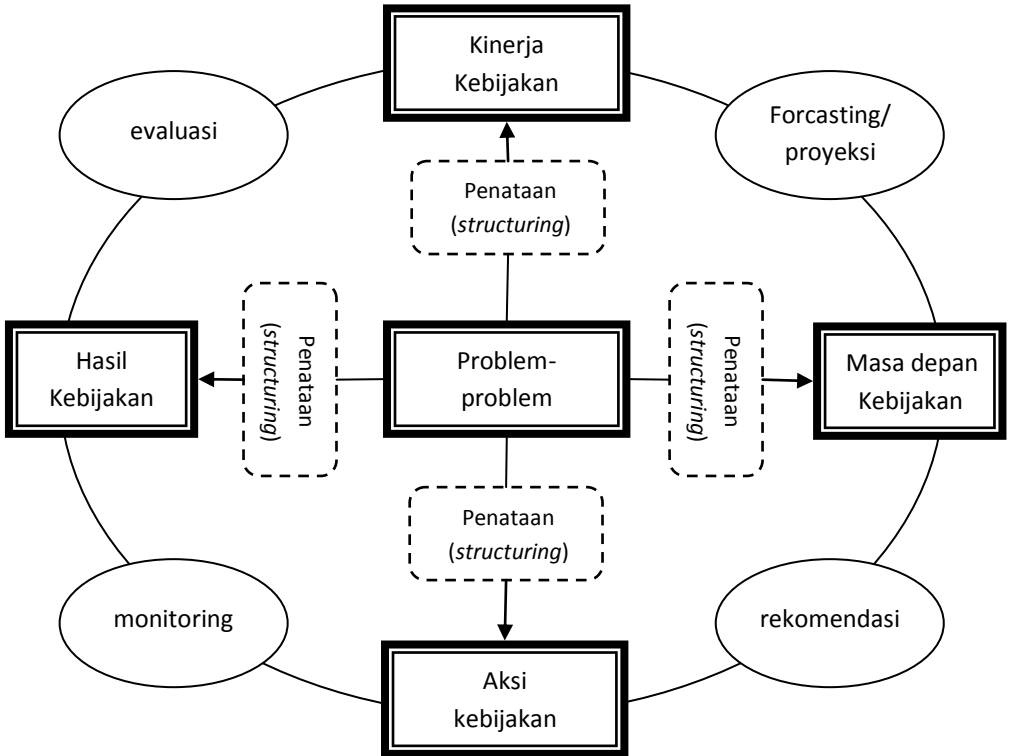
Studi kebijakan sendiri tergolong sebagai *lay-theory*, dan bukan sebagai *scientific-theory*, karena basis teorinya adalah pengalaman yang dikembangkan dari *best practices*. Namun teorinya sudah dikembangkan sedemikian rupa sehingga memunculkan sejumlah teoritis besar yang paling berpengaruh di dunia. Riant Nugroho memetakan teori studi kebijakan tersebut berdasarkan nama pencetusnya sebagai berikut:

1. William N. Dunn

Pandangan William N. Dunn tentang kebijakan tergambar dari konsepnya tentang proses kebijakan yang berpusat pada problem-problem kebijakan (*problem-centered policy analysis*) sebagai berikut:

⁴⁰ *Ibid.*

Gambar 1.1. Problem-Centered Policy Analysis versi William N. Dunn⁴¹



Berdasarkan diagram tersebut, tergambar bahwa kebijakan berangkat dari problem yang diolah dalam tindakan penataan/stukturisasi kebijakan. Hasilnya adalah kinerja kebijakan (*policy performance*), aksi kebijakan (*policy actions*), hasil kebijakan (*policy outcomes*), dan masa depan kebijakan (*policy futures*). Tindakan yang dapat dilakukan terhadap kebijakan

⁴¹ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*, terjemah oleh Samodra Wibawa dkk. dari *Public Policy Analysis: An Introduction, Second Edition*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2003, cet. ke-5, 208

tersebut terdiri dari monitoring, evaluasi, forecasting, dan rekomendasi.⁴²

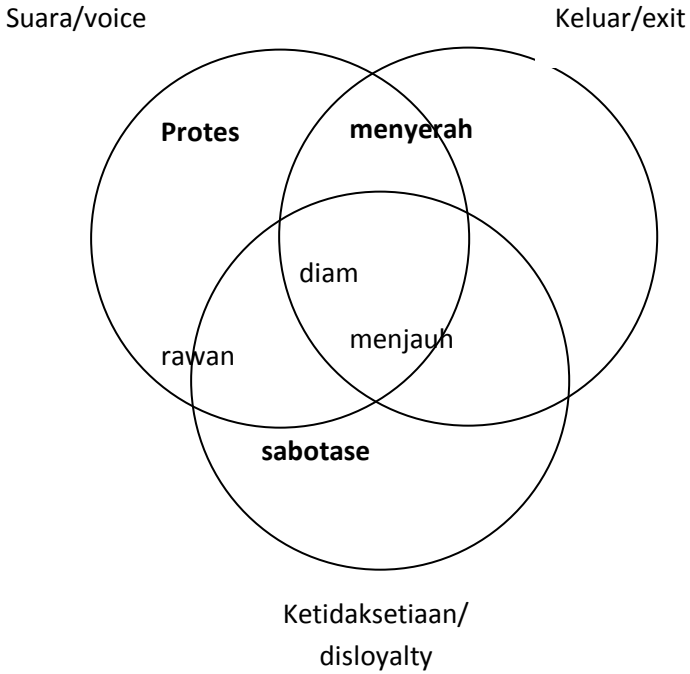
2. Weimer dan Vining

Weimer dan Vining mengembangkan pemahaman dasar bahwa studi kebijakan merupakan advis yang berorientasi kepada klien yang relevan dengan keputusan-keputusan publik dan diterima oleh nilai-nilai sosial. Weimer-Vining setia dengan paradigma sosial-ekonomi-politik, dengan memperkenalkan dua istilah yang terkait erat dengan kebijakan, yaitu kegagalan pasar (*market failures*) dan kegagalan pemerintah (*government failures*).⁴³

Menurutnya, kegagalan dalam mengambil kebijakan baik oleh pasar maupun pemerintah akan menghasilkan tiga kemungkinan, dan tidak ada kemungkinan lainnya, yaitu suara (*voice*), keluar (*exit*), dan ketidaksetiaan (*disloyalty*). Hal ini digambarkan dalam peta potensi penyelesaian konflik sebagai berikut:

⁴² Riant Nugroho, *Public Policy Edisi Keempat*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2012, 303

⁴³ *Ibid.*, 327-335

Gambar 1.2. Policy Failures versi Weimer dan Vining⁴⁴

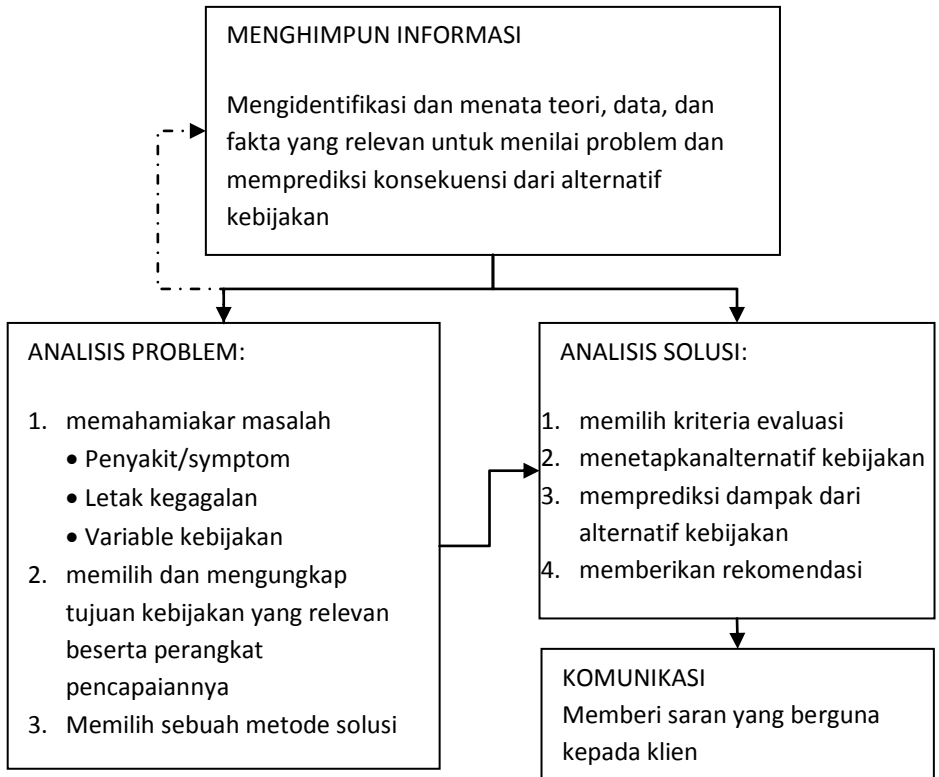
Weimer dan Vining menekankan efisiensi ekonomi sebagai tujuan penting dari evaluasi kebijakan. Namun lebih dari sekadar itu, evaluasi kebijakan harus mampu memberi kontribusi kebaikan bagi publik yang berpotensi berada di dalam tiga lingkaran di atas. Oleh karena itu, pertimbangan politik dapat menjadi solusi untuk mengatasi dominasi kepentingan pribadi di dalam kebijakan publik.⁴⁵

⁴⁴ Wiemer, David L, dan Aidan R Vining, *Policy Analysis: Concept and Practice*, New Jersey: Prentice Hall, 1999

⁴⁵ Nugroho, *Public Policy Edisi Keempat*, 335-337

Selanjutnya, dalam menganalisis kebijakan, Weimer dan Vining memberikan skema sebagai berikut:

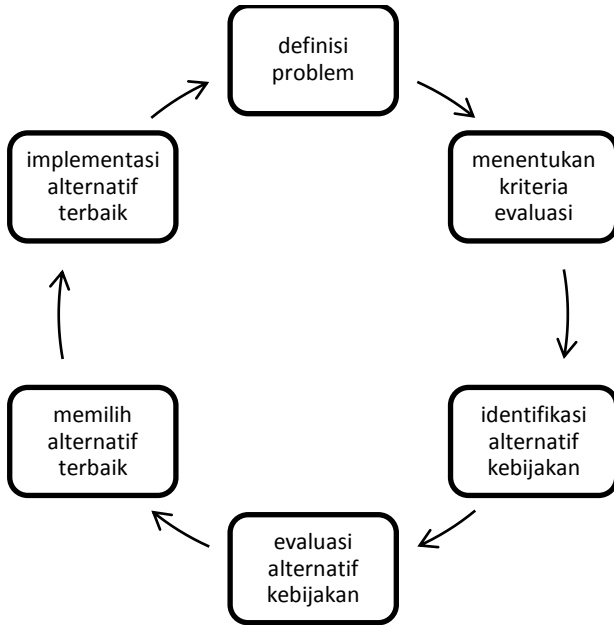
Gambar 1.3. Model Analisis Kebijakan versi Weimer dan Vining⁴⁶



3. Patton dan Savicky

Patton dan Savicky memandang bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu proses terus-menerus yang berada di akhir dan di pangkal proses kebijakan. Secara sederhana, proses tersebut digambarkan sebagai berikut:

⁴⁶ Ibid., 339

Gambar 1.4. Proses Kontinuum Evaluasi Kebijakan⁴⁷

Patton dan Savicky menekankan evaluasi kebijakan tersebut sebagai proses yang *kontinuum* (berkelanjutan) di dalam empat tahap, yaitu:

- a. Analisis *ex-ante*. Menuntut adanya analisis menyeluruh tentang problem, kriteria, alternatif, metode penerapan, dan hasil yang diharapkan (*expectedoutcomes*);
- b. Penanganan kebijakan (*policy maintenance*). Menuntut adanya jaminan bahwa kebijakan dilaksanakan sesuai dengan rancangan/desain kebijakan dan tidak terjadi penyimpangan dari rancangan/desain tersebut;

⁴⁷ Ibid., 352

- c. Pemantauan kebijakan (*policy monitoring*). Hal ini diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi selama implementasi kebijakan;
 - d. Evaluasi *ex-post*. Hal ini dibutuhkan untuk menentukan apakah suatu kebijakan harus dilanjutkan atau dimodifikasi atau dihentikan.⁴⁸
4. Edward S. Quade

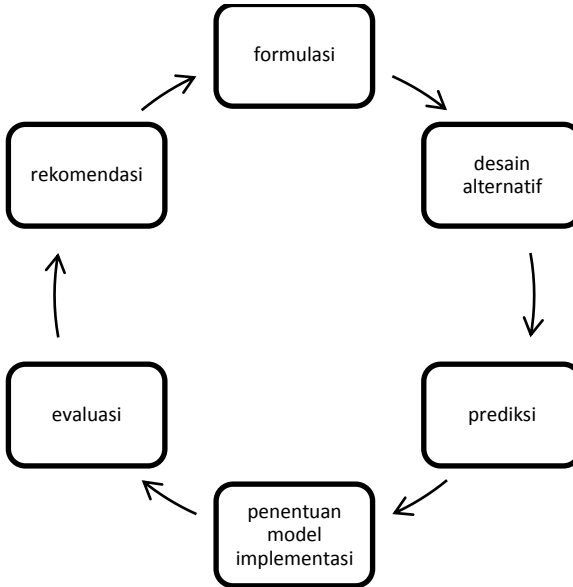
Edward S. Quade mengembangkan paradigma teknokratik dalam analisis kebijakan. Menurutnya, analisis kebijakan diperlukan untuk membantu para pengambil kebijakan sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Oleh karena itu, setiap proses analisis kebijakan harus berujung pada rekomendasi.⁴⁹

Alur analisis kebijakan digambarkan sebagai berikut:

⁴⁸ Ibid., 376

⁴⁹ Ibid., 399-400

Gambar 1.5. Paradigma Teknokratik versi Edward S. Quade⁵⁰



5. Arnold J. Meltsner

Menurut Arnold J. Meltsner, pengambilan kebijakan harus dilakukan dengan mempertimbangkan aplikabilitasnya dan memiliki pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterima secara politik dan analitis. Kebijakan itu juga harus dapat dikomunikasikan dengan sehingga menuntut adanya keahlian komunikasi dan koordinasi. Suatu kebijakan juga harus menghasilkan perubahan.

Selanjutnya Meltsner merekomendasikan model analisis kebijakan dengan paradigm birokratik melalui lima langkah sebagai berikut:

- a. Memilih problem kebijakan

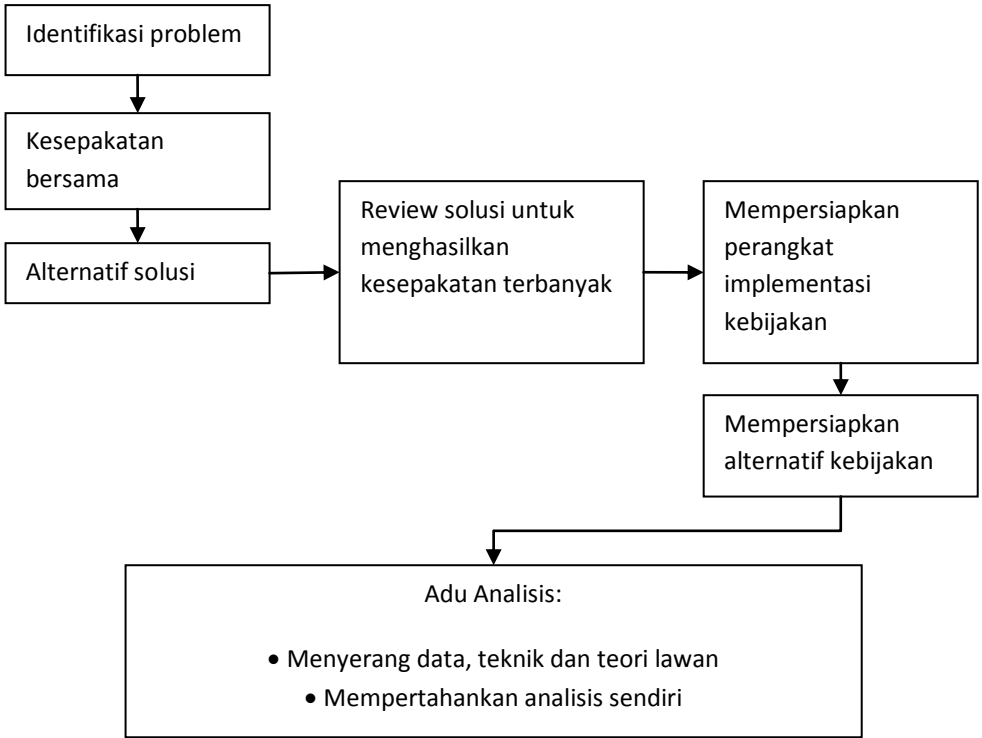
⁵⁰ Ibid., 401

- b. Merumuskan problem
 - c. Mencari data analisis yang relevan
 - d. Memperhitungkan dan menjelaskan
 - e. Menafsirkan, memberikan persuasi dan advokasi.⁵¹
6. Hank C. Jenkins-Smith

Hank C. Jenkins-Smith memandang proses kebijakan sebagai proses demokratik. Ia memperkenalkan bahwa kebijakan melalui proses inisiasi koalisi, interaksi dan respon koalisi. Model analisis yang ia perkenalkan dikenal dengan model demokratik untuk mengatasi konflik.

⁵¹ Meltsner, Arnold J., *Policy Analysis in the Bureacracy*, Berkeley: University of California Press, 1976; sebagai dikutip oleh Nugroho, *Public Policy Edisi Keempat*, 406-407

Gambar 1.6. Paradigma Demokratik Hank C. Jenkins-Smith⁵²

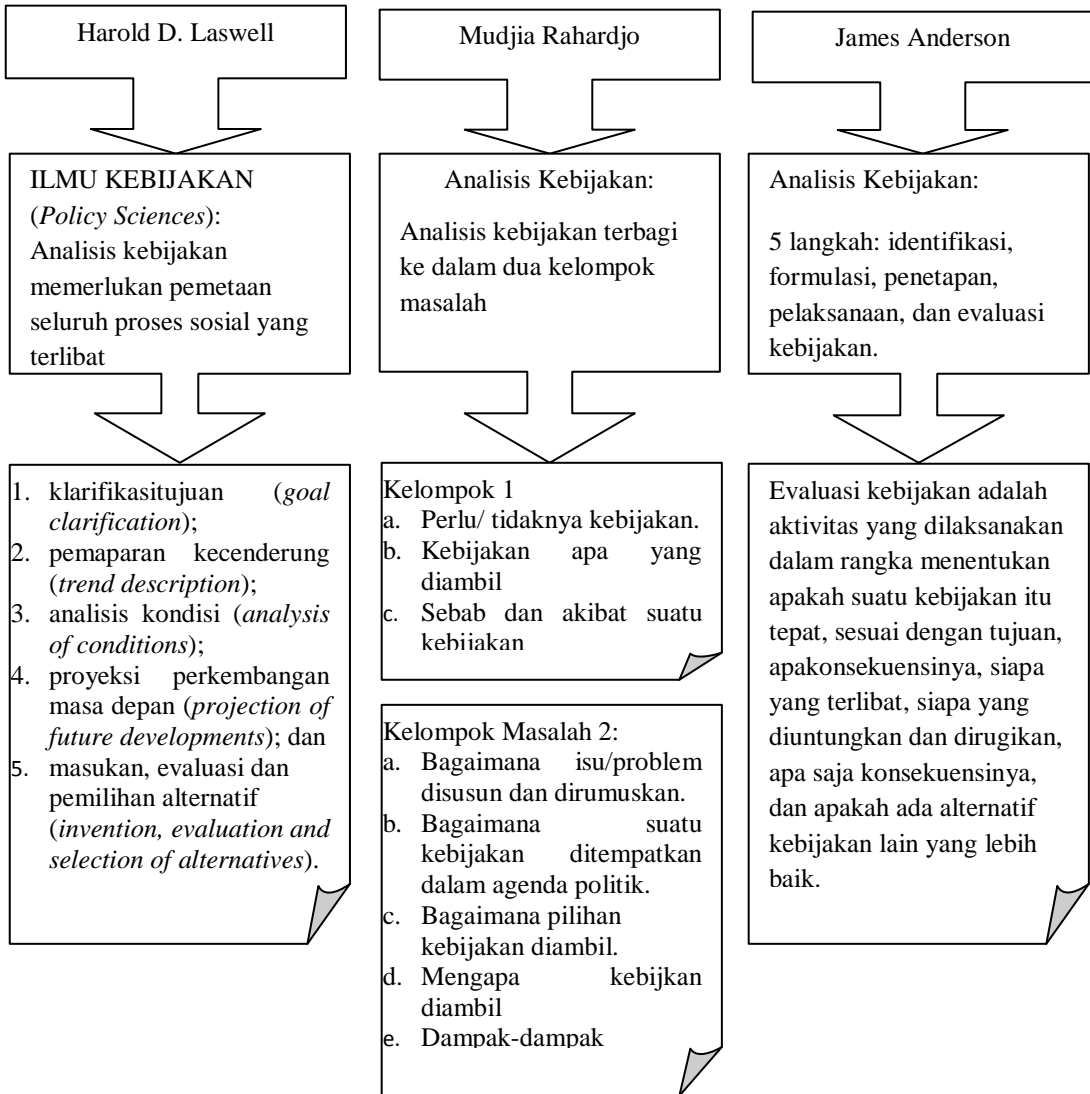


7. Paul A. Sabatier

Paul A. Sabatier berpendapat bahwa analisis kebijakan harus diletakkan dalam dua model kebijakan di Eropa, yaitu model agenda dan mandat. Model agenda adalah penetapan kebijakan berdasarkan prioritas bersama sehingga menjadi agenda nasional. Sedangkan model mandat adalah penetapan kebijakan berdasarkan prioritas partai berkuasa sehingga kebijakan pemerintah merupakan mandat partai.⁵³

⁵² Nugroho, *Public Policy Edisi Keempat*, 409

⁵³ *Ibid.*, 411

Gambar 1.7. *Conceptual Map Studi Kebijakan*

c. Teori Evaluasi Kebijakan

Adapun evaluasi kebijakan, menurut James Anderson merupakan bagian dari analisis kebijakan. Dalam hal ini, Anderson menyebutkan lima proses kebijakan, yaitu: (1) perumusan masalah (*problem formulation*), (2) perumusan kebijakan (*policy formulation*), (3) penetapan kebijakan (*policy adoption*), (4) penerapan kebijakan (*policy implementation*), dan (5) evaluasi kebijakan (*policy evaluation*).⁵⁴

Pendapat yang selaras dengan pendapat Michael Howlet dan M. Ramesh yang menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan, yaitu: (1) penyusunan agenda (*agenda setting*), (2) perumusan kebijakan (*policy formulation*), (3) pengambilan keputusan (*decision making*), (4) implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan (5) evaluasi kebijakan (*policy evaluation*).⁵⁵

Evaluasi kebijakan sendiri dimaknai sebagai aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka menentukan apakah suatu kebijakan itu tepat untuk dilaksanakan, apakah sesuai dengan tujuan, dan apakah ia memiliki konsekuensi lain. Evaluasi kebijakan juga mempertanyakan siapa yang terlibat/dilibatkan dalam kebijakan tersebut, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, apa saja konsekuensinya, apakah ada gugatan terhadap kebijakan tersebut, dan apakah ada alternatif kebijakan lain yang lebih baik.

James Anderson menyatakan:

[Policy] Evaluation. This entails activities intended to determine what a policy is accomplishing, whether it is

⁵⁴ James E. Anderson, *Public Policymaking*, 23-24

⁵⁵ Michael Howlet dan M. Ramesh, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*, Oxford: Oxford University Press, 2009, cet. Ke-3, 11

*achieving its goals, and whether it has other consequences. Who is involved? Who is advantaged and disadvantaged by a policy? What are the consequences of policy evaluation? Are there demands for changes in or repeal of the policy? Are new problems identified? Is the policy process restarted because of evaluation?*⁵⁶

Dalam menganalisis kebijakan, ada tiga aspek yang harus diperhatikan:

1. Aspek perumusan kebijakan, pada aspek ini analisis berusaha mencari jawaban bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan, siapa yang paling berperan dan untuk siapa kebijakan tersebut dibuat.
2. Aspek implementasi kebijakan, pada aspek ini analisis berusaha untuk mencari jawaban bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, apa faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana performance dari kebijakan tersebut. Aspek ini merupakan proses lanjutan dari tahap formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan-tujuan kebijakan. Sedangkan pada tahap implementasi kebijakan, tindakan/kegiatan diselenggarakan dalam rangka mencapai tujuan.
3. Aspek evaluasi, pada aspek ini analisis berusaha untuk mengetahui apa dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindakan kebijakan, baik dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Berdasarkan rumusan tersebut, maka evaluasi kebijakan diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi

⁵⁶ James Anderson, *Public Policymaking: An introduction*, Boston: Houghton Mifflin Company, 2003, 19-20, dalam http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/secgen/2015/pol-oceanica-reg_ional.pdf

dan dampak. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang fungsional dalam arti bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan.

Dengan demikian evaluasi kebijakan merupakan suatu analisis yang bersifat evaluatif sehingga konsekuensinya lebih restrospeksi dibandingkan prospeksi. Dalam mengevaluasi seorang analis berusaha mengidentifikasi efek yang semula direncanakan untuk merealisasikan suatu keberhasilan dan dampak apa yang ditimbulkan dari akibat suatu kebijakan.⁵⁷

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai “evaluasi kebijakan”. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejahtera mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan”.⁵⁸

Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan bertujuan mencari kekurangan dan menutup kekurangan.⁵⁹

Menurut William N. Dunn, evaluasi dalam konteks

⁵⁷ Sudiyono, *Model Penelitian Evaluasi (Evaluasi Dampak Program) Jurusan Ilmu Administrasi Negara*, UGM Yogyakarta, 1992 sebagaimana dikutip dalam Anonim, “Landasan Teori: Evaluasi Kebijakan”, <http://2frameit.blogspot.co.id>. Juli 2011

⁵⁸ Riant Nugroho D., *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003, 183

⁵⁹ *Ibid.*, 184

kebijakan terutama menekankan pada penciptaan premis-premis nilai yang diperlukan untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan. Oleh karena itu, istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan dan dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Secara lebih spesifik, evaluasi kebijakan berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.⁶⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka evaluasi memiliki karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya, yaitu:

1. Fokus Nilai. Evaluasi menekankan pada penilaian menyangkut urgensi atau nilai dari suatu kebijakan dan program. Maka evaluasi menekankan upaya menentukan manfaat atau kegunaan sosial suatu kebijakan atau program, dan bukan sekadar mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan.
2. Interdependensi Fakta-Nilai. Evaluasi sangat bergantung pada fakta dan nilai. Fakta diperlukan untuk menunjukkan bukti-bukti perlunya suatu kebijakan dan manfaatnya. Sedangkan nilai diperlukan menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Antara fakta dan nilai memiliki hubungan yang tak terpisahkan.
3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Evaluasi menekankan pada hasil masa sekarang dan masa lalu, bukan pada masa akan datang. Oleh karena itu, evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*). Ini yang membedakan evaluasi dan rekomendasi, di mana rekomendasi bersifat prospektif dan sebelum aksi terjadi (*ex ante*).

⁶⁰ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*, terjemah oleh Samodra Wibawa dkk. dari *Public Policy Analysis: An Introduction, Second Edition*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2003, cet. ke-5, 608

4. Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari evaluasi mempunyai kualitas ganda, di mana nilai-nilai itu dapat dipandang sebagai tujuan sebagai cara. Ketika nilai itu merupakan cara, maka nilai itu bersifat instrinsik (melekat pada kebijakan). Ketika nilai itu merupakan tujuan, maka ia bersifat ekstrinsik (sasaran yang hendak dicapai).⁶¹

Menurut William N. Dunn, evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (misalnya, perbaikan kesehatan) dan target tertentu.

Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomis, legal, sosial, substantif).

Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang. Evaluasi dapat pula menyumbang pada

⁶¹ Ibid., 608-609

definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.⁶²

Riant Nugroho merumuskan fungsi evaluasi menjadi empat, yaitu:

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.⁶³

Mengenai kriteria evaluasi kebijakan, William N. Dunn merumuskan enam kriteria sebagai berikut:

1. Efektivitas : Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
2. Efisiensi : Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?

⁶² Ibid., 609-611

⁶³ Ibid., 611

3. Kecukupan : Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
4. Perataan : Apakah biaya dan manfaat didistribusikan secara merata kepada kelompok-kelompok berbeda?
5. Responsivitas : Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
6. Ketepatan : Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?⁶⁴

Evaluasi kebijakan dilakukan dalam rangka:

- a. Untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya.
- b. Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.⁶⁵

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui: 1) proses pembuatan kebijakan, 2) proses implementasi, 3) konsekuensi kebijakan, dan 4) efektivitas kebijakan.⁶⁶ Berkenaan dengan hal tersebut, Riant Nugroho membaga evaluasi kebijakan menjadi tiga menurut waktunya, yaitu sebelum, pada waktu, dan setelah kebijakan dilaksanakan. Evaluasi sebelum pelaksanaan kebijakan

⁶⁴ Dunn, "Pengantar Analisis...", 610

⁶⁵ Muklir, "Evaluasi Kebijakan Publik", dalam <http://xpresipena.blogspot.co.id>, 8 November 2011, 3

⁶⁶ Rohyati, "Evaluasi Kebijakan Publik", dalam <http://fisip.web.unair.ac.id>

disebut evaluasi summatif. Evaluasi pada waktu kebijakan dilaksanakan disebut evaluasi proses. Evaluasi setelah dilaksanakan disebut evaluasi konsekuensi (*output*) dan evaluasi dampak/pengaruh (*outcome*).⁶⁷

Berdasarkan hal tersebut, Riant Nugroho membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tahapan sesuai dengan tiga aspek kebijakan, yaitu formulasi, implementasi dan lingkungan kebijakan. Oleh karena itu, ia memunculkan tiga tahapan evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Evaluasi Formulasi Kebijakan

Berkenaan dengan formulasi kebijakan, maka pertanyaannya menyangkut apakah formulasi kebijakan telah dilaksanakan:

- a. menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan, karena setiap masalah publik memerlukan model formulasi kebijakan publik yang berlainan;
- b. mengarah kepada permasalahan inti, karena setiap pemecahan masalah harus benar-benar mengarah kepada inti permasalahan;
- c. mengikuti prosedur yang diterima secara bersama, baik dalam rangka keabsahan maupun juga dalam kesamaan dan keterpaduan langkah perumusan;
- d. mendayagunakan sumber daya yang ada secara optimal, baik dalam bentuk sumber daya waktu, dana, manusia dan kondisi lingkungan strategis.⁶⁸

2. Evaluasi Implementasi Kebijakan

Mengutip pendapat Sofyan Effendi, Riant Nugroho mengemukakan bahwa tujuan dari evaluasi implementasi

⁶⁷ Nugroho D., “*Kebijakan Publik...*” 195

⁶⁸ Ibid, 187-188

kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu:

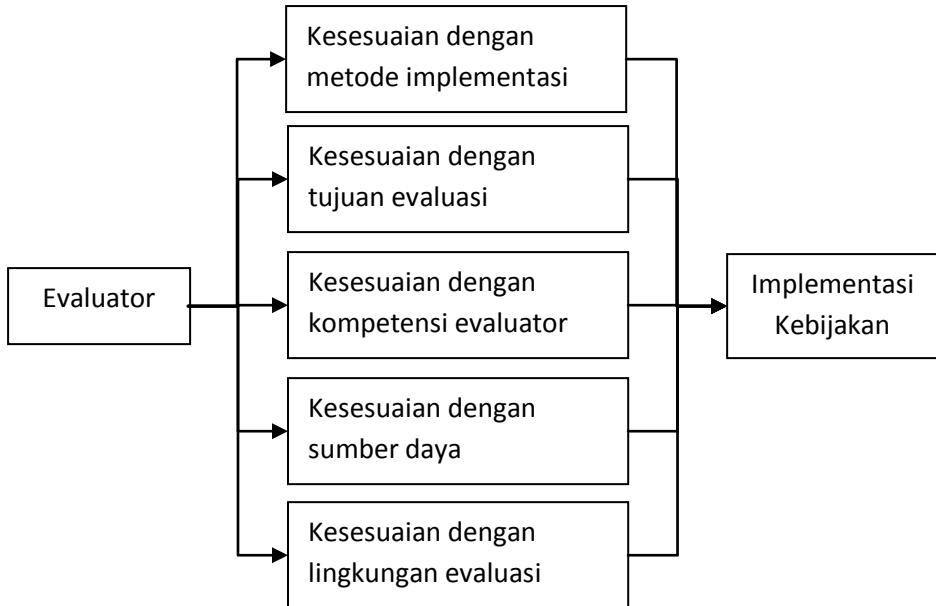
- a. Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? Jawabannya berkenaan dengan kinerja implementasi publik (variasi dari *outcome*) terhadap variabel independen tertentu.
- b. Faktor-faktor apa saja menyebabkan variasi itu? jawabannya berkenaan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang mempengaruhi variasi *outcome* dari implementasi kebijakan.⁶⁹

Operasionalisasi evaluasi implementasi kebijakan itu dirumuskan ke dalam bagan sebagai berikut:⁷⁰

⁶⁹ Ibid., 194

⁷⁰ Ibid., 201

Gambar 1.8. Operasionalisasi Evaluasi Implementasi Kebijakan



3. Evaluasi Lingkungan Kebijakan

Evaluasi lingkungan kebijakan adalah evaluasi terhadap lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan. Evaluasi ini menghasilkan sebuah deskripsi bagaimana lingkungan dibuatnya kebijakan dan lingkungan apa saja yang membuat implementasi kebijakan berhasil atau gagal.⁷¹

Evaluasi kebijakan terbagi menjadi tiga tipe, yaitu:

- a. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Menyangkut perihal kepentingan (*interest*) dan ideologi dari kebijakan.

⁷¹ Ibid., 203-204

- b. Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu.
- c. Evaluasi kebijakan sistematis. Melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut dicapai untuk menjawab kontribusi dampak dalam menjawab kebutuhan masyarakat.⁷²

Ada pula pemilahan evaluasi sesuai dengan teknik evaluasi yang dilakukan, yaitu:

1. evaluasi komparatif, yaitu membandingkan implementasi kebijakan (proses dari hasilnya) dengan implementasi kebijakan yang sama atau berlainan, di satu tempat yang sama atau berlainan.
2. evaluasi historical, yaitu membuat evaluasi kebijakan berdasarkan rentang sejarah munculnya kebijakan-kebijakan tersebut.
3. evaluasi laboratorium atau eksperimental, yaitu evaluasi namun menggunakan eksperimen yang diletakkan dalam sejenis laboratorium.
4. evaluasi *ad hoc*, yaitu evaluasi yang dilakukan secara mendadak dalam waktu segera dengan tujuan untuk mendapatkan gambar pada saat itu (*snap shot*).⁷³

Adapun langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan Standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi

⁷² Fiki Porniadi, “Evaluasi Kebijakan”, dalam <http://fikiporniadi.blogspot.co.id>, 29 April 2014, 2

⁷³ Nugroho D., “*Kebijakan Publik...*”, 198

5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.⁷⁴

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam evaluasi kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi semu (*pseudo-evaluation*). Pendekatan ini menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan. Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya (*self evident*) dan tidak kontroversial (*uncontroversial*). Hasil penilaiannya antara gagal dan berhasil. Tipe ini sering digunakan dalam kegiatan monitoring.
2. Evaluasi keputusan teoritis (*theoretic evaluation*). Pendekatan ini menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan. Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku kebijakan yang diumumkan secara formal atau diam-diam merupakan ukuran dari manfaat atau nilai kebijakan. Evaluasi ini berdasarkan parameter yang disepakati oleh pihak-pihak terkait dalam suatu kebijakan.
3. Evaluasi formal (*formal evaluation*). Pendekatan ini menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang diumumkan secara formal dan telah ditetapkan sebagai tujuan program/kebijakan. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara formal oleh pengambil kebijakan merupakan ukuran dari manfaat dan nilai

⁷⁴ Andri Rusta, "Impelementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik", dalam *fisip.ilearn.unand.ac.id*

kebijakan. Tujuan dan sasaran kebijakan tersebut tertuang dalam dokumen formal, seperti peraturan perundang-undangan.⁷⁵

Menurut Sudiyono, studi evaluasi kebijakan mempunyai dua pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan kepatuhan, asumsinya apabila para pelaksana mematuhi semua petunjuk atau aturan yang diberikan maka implementasi sudah dinilai berhasil. Kemudian pendekatan ini disempurnakan lagi dengan adanya pengaruh : a) ekstern, kekuatan non birokrasi dalam pencapaian tujuan, b) intern, program yang dimaksudkan untuk melaksanakan suatu kebijakan sering tidak terdesain dengan baik sehingga perilaku yang baik dari para pelaksana (birokrasi) tetap tidak akan berhasil dalam mencapai tujuan kebijakan.
2. Pendekatan perspektif. Pendekatan ini menggambarkan pelaksanaan suatu kebijakan dari seluruh aspek karena implementasi kebijakan melibatkan beragam variabel dan faktor.⁷⁶

Sehubungan dengan evaluasi kebijakan, para pelaku yang terlibat dalam tahap perumusan dan implementasi kebijakan, cenderung untuk memandang evaluasi dari sudut asumsi dan prosedur sehubungan dengan pencapaian tujuan. Sedangkan pengambil kebijakan (*policy maker*) cenderung memandang evaluasi dari segi kepentingan sasaran kebijakan (*constituents*). Cara evaluasi kebijakan adalah melalui survei terhadap kepuasan sasaran kebijakan. Adapun pelaksana kebijakan (*policy implementer*) cenderung memandang evaluasi dari segi keberhasilan

⁷⁵ Dunn, "Pengantar Analisis...", 612-623

⁷⁶ Andri Rusta, "Impelementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik", dalam *fisip.ilearn.unand.ac.id*

mengelola program. Karena itu ada kecenderungan untuk menguasai dan mempengaruhi informasi yang diberikan pada *policy decision makers*.

Evaluasi kebijakan lazimnya dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu oleh evaluator profesional. Dalam hal ini, evaluasi dilakukan secara metodologis dengan mengedepankan hasil evaluasi yang benar secara ilmiah (*scientifically valid findings*). Dalam hal ini, pengambil dan pelaksana kebijakan akan menerima hasil evaluasi oleh profesional sebagai evaluator teknis, apabila dipenuhi persyaratan tertentu, yaitu:

1. Tujuan yang diinginkan oleh *policy maker* setelah dipahami dengan benar oleh evaluator teknis;
2. Pencapaian tujuan diukur dengan obyektif
3. Laporan evaluasi menjelaskan hubungan antara tujuan dengan hasil.⁷⁷

Secara umum, evaluasi formulasi kebijakan publik berkenaan dengan apakah formulasi kebijakan publik telah dilaksanakan:

1. Menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan, karena setiap masalah publik memerlukan model formulasi kebijakan publik berlainan.
2. Mengarah kepada permasalahan inti, karena setiap pemecahan masalah harus benar-benar mengarah kepada inti permasalahannya.
3. Mengikuti prosedur yang diterima secara bersama, baik dalam rangka keabsahan maupun juga dalam rangka kesamaan dan keterpaduan langkah perumusan;
4. Mendayagunakan sumber daya ada secara optimal, baik dalam bentuk sumber daya waktu, dana, manusia, dan kondisi lingkungan strategis.⁷⁸

⁷⁷ Muklir, "Evaluasi Kebijakan Publik", 4-5

Sementara itu, Ernest R. House membuat taksonomi evaluasi kebijakan yang terbagi menjadi model-model evaluasi sebagai berikut:

1. model sistem, dengan indikator utama adalah efisiensi.
2. model perilaku, dengan indikator utama adalah reduktivitas dan akuntabilitas.
3. model formulasi keputusan, dengan indikator utama adalah keefektifan dan keterjagaan kualitas.
4. model tujuan bebas (*goal free*), dengan indikator utama adalah pilihan pengguna dan manfaat sosial.
5. model kekritisian seni (*art criticism*), dengan indikator utama adalah standar yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat.
6. model review profesional, dengan indikator utama adalah penerimaan profesional.
7. model kuasi-legal (*quasi-legal*), dengan indikator utama adalah resolusi, dan
8. model studi kasus, dengan indikator utama adalah pemahaman atas diversitas.⁷⁹

Menurut Finsterbusch dan Motz, terdapat empat jenis evaluasi kebijakan, yaitu :

1. *Single program after only*, merupakan jenis evaluasi yang melakukan pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program setelah meneliti setiap variabel yang dijadikan kriteria program. Sehingga analisis tidak mengetahui baik atau buruk respon kelompok sasaran terhadap program.
2. *Single program before-after*, merupakan penyempurnaan dari jenis pertama yaitu adanya data tentang sasaran

⁷⁸ Riant Nugroho D., *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003, 197-198

⁷⁹ *Ibid.*, 15

program pada waktu sebelum dan setelah program berlangsung.

3. *Comparative after only*, merupakan penyempurnaan evaluasi kedua tapi tidak untuk yang pertama dan analisis hanya melihat sisikeadaansasaran bukan sarannya.
4. *Comparative before-after*, merupakan kombinasi ketiga desain sehingga informasi yang diperoleh adalah efek program terhadap kelompok sasaran.⁸⁰

Evaluasi kebijakan yang baik harus mempunyai beberapa syarat pokok sebagai berikut

1. tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan.
2. yang bersangkutan harus mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan.
3. prosedur evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi.⁸¹

Namun demikian, evaluator teknis hanya bisa melaksanakan tugasnya, apabila:

1. Tujuan kebijakan jelas
2. Tujuan dapat diukur
3. Implementasi diarahkan untuk mencapai tujuan
4. Tersedia cukup data yang diperlukan.⁸²

Selain tipe evaluasi kebijakan yang lazim digunakan, terdapat pula evaluasi lingkungan kebijakan. Jenis evaluasi ini mendapat sedikit sekali perhatian, baik dari praktisi maupun akademisi evaluasi kebijakan publik. Kenyataan ini harus diakui karena sesungguhnya, sekuat apa pun pengaruh

⁸⁰ Bappenas, *Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi*, Jakarta: Kememnterian BPN/Bappenas, 2013, 9

⁸¹ Muklir, "Evaluasi Kebijakan Publik", 4

⁸² *Ibid.*, 4

lingkungan, ia merupakan faktor yang berada di luar kendali dari kebijakan publik. Karena itu, acapkali lingkungan “dikeluarkan” dari evaluasi kebijakan publik. Namun demikian, perkembangan terkini membuktikan bahwa keberhasilan dan kegagalan kebijakan tidak lagi ditentukan oleh keandalan kebijakan dan implementasinya, namun dukungan lingkungan. Konteks “lingkungan” dikedepankan karena perubahan yang terjadi hari ini dan dimasa depan adalah perubahan dalam volume yang besar dan cepat. Kenyataan ini begitu mencemaskan karena tidak banyak melihat sebuah kebijakan ketika selesai dibuat, mendadak sudah menjadi usang karena perubahan.⁸³

Mudjia Rahardjo menjelaskan bahwa ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam analisis kebijakan, yaitu kerangka kebijakan, konteks kebijakan dan pelaku kebijakan.

a. Kerangka Kebijakan

Kerangka kebijakan mencakup:

- 1) Kemunculan isu dan identifikasi masalah. Pada tahap ini, dilakukan pengenalan terhadap suatu masalah atau persoalan yang memerlukan perhatian pemerintah, masalah-masalah yang mendapat tempat dalam agenda publik serta agenda resmi, serta mobilisasi dan dukungan awal bagi strategi tertentu.
- 2) Perumusan dan otorisasi kebijakan. Pada tahap ini, dilakukan eksplorasi berbagai alternatif, perumusan seperangkat tindakan yang lebih dipilih, usaha-usaha untuk mencapai konsensus atau kompromi, otorisasi formal strategi tertentu seperti melalui proses legislasi, isu pengaturan atau penerbitan arahan-arahan.
- 3) Implementasi kebijakan. Pada tahap ini, dilakukan

⁸³ Bappenas, *Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi*, 10-11

interpretasi terhadap kebijakan dan aplikasinya terhadap kasus tertentu, serta pengembangan satu atau lebih program sebagai alternatif yang dipilih untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

- 4) Perubahan atau pemberhentian kebijakan. Pada tahap ini, dilakukan penghentian karena masalah telah dipecahkan, kebijakan tidak berhasil atau hasilnya dinilai tidak diinginkan, melakukan perubahan mendasar berdasarkan umpan-balik, atau mengganti kebijakan tertentu dengan kebijakan baru.

b. Konteks Kebijakan

Aspek kedua yang harus dikaji dalam analisis kebijakan pendidikan adalah konteks kebijakan. Ini harus dilakukan karena kebijakan berkembang dalam konteks seperangkat nilai, tekanan, kendala, dan dalam pengaturan struktural tertentu. Kebijakan juga merupakan tanggapan terhadap masalah-masalah tertentu, kebutuhan serta aspirasi yang berkembang.

c. Pelaku Kebijakan

Aspek ketiga yang harus dikaji dalam analisis kebijakan pendidikan adalah pelaku atau aktor kebijakan. Pelaku kebijakan pendidikan bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu: para pelaku formal dan pelaku informal. Pelaku formal kebijakan adalah perorangan atau lembaga yang secara legal memiliki tanggungjawab berkenaan dengan kebijakan tersebut. Pelaku informal adalah individu atau organisasi yang terdiri dari kelompok kepentingan, partai politik, dan media. Kelompok kepentingan dalam bidang pendidikan misalnya, mencakup serikat guru, asosiasi yang mewakili jenis atau jenjang pendidikan tertentu, asosiasi yang mewakili

peserta didik, asosiasi yang mewakili pimpinan perguruan tinggi, hingga asosiasi yang mewakili orangtua peserta didik, dan sebagainya.⁸⁴

Analisis kebijakan inilah yang menjadi sebab munculnya berbagai perubahan kebijakan, karena terbukti harus mengalami revisi dan bahkan digantikan dengan kebijakan yang baru sama sekali. Proses analisis kebijakan ini harus terus berlangsung dalam rangka menjaga upaya perbaikan secara terus-menerus, menuju format kebijakan yang terbaik dan yang paling relevan dengan perkembangan.

Berdasarkan teori-teori di atas, maka kerangka teori yang melandasi penelitian ini dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel 1.1. *Concept Map Teori Evaluasi Kebijakan*

<p>Objek/ Ruang Lingkup Evaluasi</p>	<p>Riant Nugroho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulasi • Implementasi • Lingkungan <p>Sofian Effendi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isu • Formulasi • Implementasi • Kinerja <p>Sudiyono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Substansi • Implementasi • Kinerja
--	--

⁸⁴ Mudjia Rahardjo, *Pengantar Analisis Kebijakan Pendidikan*, 1 Februari 2010

	<p>William N. Dunn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Policy actions</i> • <i>Policy performance</i> • <i>Policy outcomes</i> • <i>Policy futures</i> <p>Mudjia Rahardjo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerangka kebijakan • Konteks kebijakan • Pelaku kebijakan <p>Harold D. Laswell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • klarifikasitujuan (<i>goal clarification</i>) • pemaparan kecenderungan (<i>trend description</i>) • analisis kondisi (<i>analysis of conditions</i>) • proyeksi perkembangan masa depan (<i>projection of future developments</i>) • masukan, evaluasi dan pemilihan alternatif (<i>invention, evaluation and selection of alternatives</i>).
Kriteria	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas • Efisiensi • Kecukupan • Perataan/distribusi • Responsivitas • Ketepatan
Karakteristik	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus Nilai • Interdependensi Fakta-Nilai • Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. • Dualitas Nilai

Fungsi	<p>Riant Nugroho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eksplanasi • Kepatuhan • Audit • Akunting <p>William N. Dunn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan • memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target • memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.
Teknik	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi komparatif • evaluasi historical • evaluasi laboratorium atau eksperimental • evaluasi <i>ad hock</i>
Pendekatan	<p>William N. Dunn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi semu (<i>pseudo-evaluation</i>) • Evaluasi keputusan teoritis (<i>theoretic evaluation</i>) • Evaluasi formal (<i>formal evaluation</i>). <p>Sudiyono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan • Perspektif

Model	<ul style="list-style-type: none"> • model sistem • model perilaku • model formulasi keputusan • model tujuan bebas (<i>goal free</i>) • model kekritisan seni (<i>art criticism</i>) • model review profesional • model kuasi-legal (<i>quasi-legal</i>) • model studi kasus
Jenis	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Single program after only</i> • <i>Single program before-after</i> • <i>Comparative after only</i> • <i>Comparative before-after</i>

2. Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang mengakar (*indigenous*) dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia, sehingga tak terpisahkan dari sejarah perkembangan Islam di nusantara. Lembaga pendidikan Islam itu sendiri tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya kegiatan dakwah dan pengajaran agama Islam yang berbasis di masjid. Sehingga masjid sejak masa awal Islam di tanah air berfungsi ganda sebagai tempat ibadah dan tempat belajar (*madrasah*). Hal itu terlacak dari lembaga semacam *surau* di Minangkabau dan *meunasah* di Aceh Darussalam.⁸⁵

Martin van Bruinessen menjelaskan bahwa pesantren tumbuh dalam pengaruh tiga budaya, yaitu Arab, India, dan Indonesia. Pengaruh Arab berasal dari arus kegiatan studi umat Islam ke Timur Tengah. Pengaruh India berasal dua agama asal India, yaitu Hindu dan Budha, yang memperkenalkan pola

⁸⁵ Zuhairini dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, cet. ke-5, 89-98

pendidikan yang mengutamakan kesederhanaan dan kemandirian siswa dalam sistem asrama. Berdasarkan perpaduannya dengan kultur Indonesia, maka tumbuhlah sistem pendidikan dalam bentuk *mandala*, *padepokan*, *peguron*, *pertapaan*, dan *perdikan*. Tiga pengaruh itulah yang membentuk sistem pendidikan pondok pesantren.⁸⁶

Sejumlah pakar pendidikan Islam sendiri berpandangan bahwa pesantren merupakan hasil adopsi dari lembaga pendidikan *kuttab* yang tumbuh dalam tradisi Islam kalsik, yang selanjutnya berkembang menjadi madrasah.⁸⁷

Akan tetapi, pondok pesantren lebih dari sekadar madrasah. Pesantren pada umumnya berdiri diawali dari pengakuan masyarakat terhadap otoritas keilmuan seorang kyai. Karena keinginan untuk memperoleh ilmu dari kyai yang diakui, maka masyarakat mendatangi kyai untuk menimba ilmu. Karena beberapa kesulitan yang dihadapi, terdapat beberapa masyarakat-pelajar yang kemudian menetap di sekitar tempat tinggal kyai dengan membangun pondok-pondok sederhana.⁸⁸

Sejarah perkembangan tersebut membentuk ciri khas pondok pesantren yang terdiri dari lima unsur utama, yaitu kiyai, santri, kitab kuning, masjid, dan asrama/pondok.⁸⁹

a. Pondok. Pondok dalam pesantren memiliki muatan yang dalam, pondok bukan saja tempat tinggal kyai bersama para santri, dan juga sarana bagi kyai dan santri untuk

⁸⁶ Martin van Bruinessen, "Pesantren dan Kitab Kuning: Pemeliharaan dan Kesenambungan Tradisi Pesantren," dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, Vol III, No. 4 Th. 1992, 73

⁸⁷ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995, 24

⁸⁸ *Ibid.*, 138

⁸⁹ *Ibid.*, 24

bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, tapi pondok juga merupakan satu identitas khas yang membedakan Pondok Pesantren dari lembaga pendidikan Islam lainnya seperti pendidikan Islam yang diselenggarakan di masjid dan langgar. Selain itu, pondok juga tidak hanya difungsikan sebagai tempat tinggal santri yang rata-rata jauh dari rumah, namun juga merupakan sarana pelatihan bagi santri untuk dapat bersosialisasi dan hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat. Itulah gambaran awal dari fungsi pondok di pesantren yang lambat laun mulai beralih fungsi secara formalistik sebagai semata-mata tempat tinggal (asrama) para santri, dengan biaya tertentu yang dipungut dari santri sebagai upaya untuk memelihara fasilitas pondok.⁹⁰

- b. Masjid. Masjid merupakan unsur pokok yang mesti ada dalam pesantren sebagai pusat kegiatan ibadah dan belajar-mengajar. Masjid dalam perkembangan awal di pesantren, di samping berfungsi sebagai tempat ibadah, terutama shalat lima waktu, juga berfungsi sebagai tempat belajar-mengajar. Waktu belajar di masjid biasanya terikat dengan waktu shalat berjama'ah, baik sebelum atau sesudahnya. Seiring dengan perkembangan santri yang besar, dan ketika masjid dilihat tidak lagi efektif digunakan sebagai sarana pendidikan, barulah ruangan-ruangan khusus untuk pembelajaran bermetode halaqah di bangun, hingga pada perkembangan dewasa ini, telah banyak Pondok Pesantren yang memiliki lokal khusus sebagai sarana belajar-mengajar dengan sistem klasikal, seperti yang biasaditemui di madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah formal. Namun demikian, fungsi masjid sebagai sarana belajar-mengajar tidaklah hilang sama-sekali, masjid masih setting

²¹ *Ibid.*, 142

difungsikan sebagai sarana belajar-mengajar, dan terutama untuk latihan keterampilan mukhadarah, dan juga latihan individual, seperti i'tikaf, suluk, dan dzikir, yang biasa dilatih para santri dalam mengarungi dunia tarekat.⁹¹

- c. Santri. Santri sebagai penuntut ilmu dalam pesantren, merupakan salah-satu unsur pokok dalam pesantren. Santri biasanya terdiri dari dua kelompok: (1) santri mukim, yaitu santri yang berasal dari daerah yang jauh, dan mondok di pesantren, serta (2) santri kalong, yaitu santri yang berasal dari daerah sekitar pesantren, dan biasanya tidak mondok di pesantren. Santri kalong biasanya, pulang ke rumah masing-masing ketika jam pelajaran usai, dan kembali ke pesantren ketika pelajaran di mulai.

Perbedaan antara Pondok Pesantren yang besar dengan yang kecil, biasanya terletak pada perbedaan komposisi kedua kelompok santri. Pondok Pesantren besar, seperti Gontor Ponorogo, Tebuireng Jombang, Darussalam Martapura, dan sebagainya, biasanya mempunyai jumlah santri mukim yang lebih besar dari santri kalong. Sedangkan Pondok Pesantren yang kecil, biasanya memiliki jumlah santri kalong yang lebih besar dari pada santri mukim.⁹² Hal itu, disebabkan oleh perbedaan pengaruh antara Pondok Pesantren yang besar dengan yang kecil. Pondok Pesantren yang besar biasanya memiliki figur kyai yang mampu menyedot minat santri dari berbagai daerah, sehingga mereka memiliki banyak santri mukim. Selain itu, para santri (baik di daerah sekitar ataupun dari luar daerah) biasanya bangga dengan predikat santri mukim pada sebuah Pondok Pesantren yang diakui kredibilitas pengajarnya.

²² Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1983, 136

²³ Hasbullah, "Sejarah Pendidikan Islam..."., 143-144

- d. Kiai. Kiai merupakan tokoh sentral dalam Pondok Pesantren, sebagai figur panutan, pengajar, dan pimpinan tertinggi Pondok Pesantren. Karena itu, kyai, merupakan unsur terpokok dalam pesantren, di mana kemashuran, perkembangan, dan kelangsungan hidup sebuah Pondok Pesantren tergantung kepada keahlian, kompetensi keilmuan, kharisma, wibawa, serta keterampilan kiai dalam mengelola pondoknya. Sebutan kyai, merupakan gelar kemasyarakatan yang diperuntukkan bagi seseorang yang diakui kompetensi dan kredibilitas keilmuannya dalam bidang agama, yang dewasa ini dapat puladisandang oleh seseorang yang tidak memiliki, memimpin, atau mengajar di Pondok Pesantren. Namun demikian, gelar kyai disandang oleh orang yang benar-benar diakui kadar dan kedalaman pengetahuannya di bidang agama oleh masyarakat luas.⁹³
- e. Kitab-kitab Islam Klasik (Kitab Kuning). Kitab kuning, merupakan kitab-kitab Islam klasik karangan ulama besar terdahulu, yang diajarkan dalam tradisi pengajaran di Pondok Pesantren. Kitab kuning memuat berbagai macam pengetahuan agama Islam dan bahasa Arab. Karena itu, pelajaran kitab kuning dalam pesantren, dimulai dengan kitab-kitab yang paling sederhana, umumnya pengetahuan bahasa Arab dan ibadah, baru kemudian dilanjutkan dengan kitab-kitab yang mengandung pengetahuan agama lebih mendalam dan rumit, seperti kitab fiqh, hadits, atau bahkan mantiq dan tasauf.⁹⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka meskipun sejumlah ahli menyebut pondok pesantren terpengaruh oleh sistem pendidikan yang berasal dari India dan Arab, atau seperti

²⁴ Ibid., 144

⁹⁴ Ibid., 144

pendapat Martin van Bruinessen yang menyebut pesantren sebagai perpaduan budaya pendidikan India, Arab dan Indoensia, namun pesantren membentuk tradisinya sendiri yang khas dengan kelima unsurnya tersebut. Jika dilihat dari keberadaan pesantren yang mengakar dalam tradisi pendidikan umat Indonesia, maka pondok pesantren lebih tepat sebagai lembaga pendidikan Islam Indonesia yang *indigenuos*, sebagaimana dinyatakan oleh Nurcholish Madjid, yaitu *indigenous* dalam arti mengakar dalam budaya pendidikan Islam Indonesia.⁹⁵

Berdasarkan sejarahnya, keberadaan pondok pesantren sangat lekat dengan tradisi Nahdlatul Ulama, khususnya pondok pesantren berhaluan salafiyah. Oleh karena itu, ciri khas pondok pesantren salafiyah (PPs) adalah penggunaan bahan ajar yang bersumber dari fiqh Syafi'i, aqidah Asy'ariyah, dan tasawwuf al-Ghazali.⁹⁶

Namun demikian, keberadaan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo memberi warna lain bagi pondok pesantren, yang dikenal dengan pondok pesantren khalafiyah, dengan menanggalkan afiliasinya kepada organisasi keagamaan tertentu.

Dua warna pondok pesantren itulah yang menjadi identitas asli pondok pesantren di Indonesia, yang sama-sama menjadi benteng paham Ahlussunnah Wal-Jama'ah dengan jargon yang terbukti berhasil dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi, yaitu:

⁹⁵ Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren*, Jakarta: Paramadina, 1997, 106

⁹⁶ Martin van Bruinessen, "Konjungtur Sosial Politik di Jagat NU Paska Khittah 26: Pergulatan NU Dekade 90-an", dalam Ellyasa KH. Dharwis (ed.), *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: LKiS-Pustaka Pelajar, 2002, 27

اَلْمُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِوَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

“Melestarikan hal lama yang baik; dan mengadopsi hal baru yang lebih baik.”

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu studi kebijakan yang disusun secara deskriptif, eksploratif, eksplanatif, analitis dan evaluatif.⁹⁷ Selain itu juga digunakan pendekatan deskriptif-analitis dan kritis terhadap data yang bersifat kualitatif.⁹⁸ Hal ini dilakukan dengan melakukan deskripsi, eksplorasi, eksplanasi, analisis dan evaluasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan pondok pesantren di Provinsi Jambi.

Pendekatan kualitatif digunakan dalam rangka meneliti kondisi obyek yang alamiah (natural), di mana peneliti dianggap sebagai instrumen kunci, dan teknik pengumpulan datanya pun dilakukan secara gabungan. Analisis data yang dipergunakan lebih banyak bersifat induktif (dari pengertian khusus menuju pengertian yang bersifat umum), dan hasilnya lebih menekankan kepada *makna* dari pada *generalisasi*.⁹⁹

Dalam mendesain penelitian secara menyeluruh dapat dilakukan dengan sasaran penelitian yang terbatas dalam suatu rangkaian pokok permasalahan, namun dengan keterbatasan sasaran itu dapat saja digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian tersebut. Dengan demikian kendatipun sasaran penelitian terbatas, tetapi kedalaman berbagai aspek mengenai

⁹⁷ Erman Aminullah, “Desain Penelitian Kebijakan”, makalah LIPI dalam <http://ajisofanudin.blogspot.co.id>, Mei 2015, 1

⁹⁸ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 5.

⁹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 1.

informasi dan kualitas data yang diperoleh-tidak terbatas. Artinya semakin berkualitas data yang dikumpulkan, maka penelitian yang dilakukan akan semakin berkualitas pula.¹⁰⁰

Jenis penelitiannya adalah analisis dokumen, yaitu dengan melakukan telaah terhadap dokumen-dokumen terkait. Sehubungan dengan analisis dokumen, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*).¹⁰¹ Dalam hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pengembangan pondok pesantren di Provinsi Jambi. Untuk mendukung analisis dokumen, peneliti juga melakukan studi lapangan dengan mengungkap fenomena perkembangan pondok pesantren di Provinsi Jambi.

2. Setting dan Subjek Penelitian

a. Setting

Penelitian ini dilakukan pada pondok pesantren di Provinsi Jambi dalam rentang waktu penelitian dari tahun 2009-2016. Setting tersebut dipilih karena penulis menemukan fakta-fakta awal yang menarik untuk diteliti terkait dengan pengembangan pondok pesantren. Setting wilayah digunakan agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kebijakan pemerintah dalam pengembangan pondok pesantren di Provinsi Jambi.

b. Subjek

Adapun subjek penelitian ini adalah kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, sebagaimana tertuang dalam bentuk peraturan perundangan-undangan dan turunannya. Adapun untuk menangkap fenomena pengembangan pesantren, maka dilakukan sampling terhadap sejumlah pondok pesantren di Provinsi Jambi guna

¹⁰⁰ Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), 14.

¹⁰¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 32

mendapatkan gambaran tentang kebijakan pemerintah tentang pengembangan pondok pesantren.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Data primer, yaitu data yang bersumber dari dokumen resmi tentang kebijakan pemerintah dalam pengembangan pondok pesantren di Provinsi Jambi dan fakta perkembangan pondok pesantren di Provinsi Jambi.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang tidak bersumber dari dokumen resmi, seperti laporan penelitian yang relevan, buku dan artikel.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga unsur:

- 1) Manusia, yaitu pihak-pihak yang berwenang dalam kaitan dengan pengembangan pondok pesantren, baik di level nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
- 2) Kejadian/peristiwa, yaitu fenomena perkembangan pondok pesantren di Provinsi Jambi.
- 3) Dokumen, yaitu data-data tertulis mengenai perkembangan pondok pesantren di Provinsi Jambi.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai *setting*, *sumber*, dan *cara*. Secara umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/ triangulasi.¹⁰²

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁰² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 63.

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian, dengan melihat secara langsung fakta-fakta yang ditemukan dalam kenyataan di lapangan. Hasil observasi itu dicatat untuk dilakukan analisis, apakah sesuai atau tidak dengan teori yang ada.¹⁰³

Penelitian ini menggunakan observasi non-partisipan, yaitu meliputi kegiatan mengamati dan mempelajari objek kajian tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian, serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau yang memenuhi syarat untuk digunakan ke dalam tingkat penafsiran analitis. Observasi dilakukan terhadap perkembangan pondok pesantren di Provinsi Jambi.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data secara lisan, melalui tatap muka langsung antara peneliti dengan subjek yang dapat dijadikan sumber data. Teknik wawancara dibagi dalam dua teknik, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang telah memiliki kejelasan masalah yang akan ditanyakan dan dengan setting situasi yang dikondisikan.¹⁰⁴

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait di pemerintahan dan pada pondok pesantren sehubungan dengan perkembangan pondok pesantren di Provinsi Jambi.

¹⁰³ Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, Jakarta: Haji Masagung, 1989, 100; Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: UGM Press, 1980, 45; James A Black dan Dean J. Champions, *Metode dan Penelitian Sosial* (terj.), Bandung: Refika Aditama, 2001, 286

¹⁰⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1963, 231

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa saja berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan”¹⁰⁵

Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data berupa dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Pemilihan metode ini didasarkan pada alasan bahwa metode ini dapat membantu peneliti dalam melakukan pengujian terhadap berbagai data yang diperoleh melalui metode observasi dan wawancara. Selain itu juga untuk memudahkan peneliti dalam memberikan penafsiran terhadap dokumen yang berhasil dikumpulkan.

Di samping tiga cara di atas, penelitian ini juga akan menggunakan data pengalaman pribadi (*individual's life history*), yang lazim digunakan dalam tradisi keilmuan antropologi, psikologi (*personal document*), dan sosiologi (*human document*).¹⁰⁶ Dalam hal ini, data ini sangat diperlukan untuk dapat mengungkap realitas-realitas sosial yang sulit digali dan diungkap melalui metode interview dan observasi biasa.

5. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses kategorisasi, penataan, pengolahan, dan peringkasan data untuk memperoleh jawaban bagi pertanyaan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan analisis data mengalir (*flow model*). Langkah-langkahnya adalah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁰⁷

¹⁰⁵ *Ibid.*, 82

¹⁰⁶ Koentjaraningrat, Metode Penggunaan Data Pengalaman Individu”, dalam Koentjaraningrat (ed.), *Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 1977), 197

¹⁰⁷ Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis (a Source book of New Methods)*, Beverly Hills: Sage Publications, 1984, 21-24

a. Reduksi Data

Data yang telah dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dibaca, dipelajari, dan ditelaah. Setelah itu dilakukan reduksi data. Langkah ini terkait erat dengan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan men-transformasikan data mentah yang diperoleh dari hasil penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data berupaya untuk menampilkan atau menceritakan secara transparan apa yang diperoleh dari data yang dikumpulkan. Bentuk penyajian data yang umum dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif yakni menceritakan secara panjang lebar temuan penelitian. Akan tetapi teks naratif tersebut telah sering dialihkan menjadi bentuk matrik, grafik, jaringan kerja, dan tabel.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari proses analisis data. Setelah data yang terkumpul direduksi dan selanjutnya disajikan, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan.¹⁰⁸

6. Pemeriksaan Keabsahan Data

Tingkat keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan teknik perpanjangan keikutsertaan peneliti, kecermaan pengamatan peneliti, dan triangulasi. Teknik-teknik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan sangat menentukan dalam proses penelitian lapangan, karena dapat menjadi akurasi dan validitas data, sehingga terhindar dari distorsi

¹⁰⁸ *Ibid.*, 21-24

data.¹⁰⁹ Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti di lapangan penelitian. Penting sekali arti perpanjangan keikutsertaan peneliti itu, guna berorientasi dengan situasi, dan memastikan apakah konteks itu dipahami dan dihayati.

b. Kecermatan Pengamatan

Kecermatan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan yang dicari, kemudian memusatkan perhatian pada hal-hal tersebut secara rinci.¹¹⁰

Teknik ini digunakan untuk menunjang teknik perpanjangan keikutsertaan, sehingga tidak terjadi pengumpulan data secara tergesa-gesa dan tidak akurat.

c. Triangulasi

Teknik ini digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sumber data pembanding.¹¹¹ Teknik ini memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, untuk keperluan pengecekan, atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik diperlukan agar menghasilkan data-data yang valid dan akurat tentang objek yang diteliti. Teknik ini meliputi:

- 1) Triangulasi data, yaitu melakukan cross-check antara data observasi, wawancara dan dokumentasi, sehingga dihasilkan data yang paling akurat.

¹⁰⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 200, 175-177

¹¹⁰ Ibid., 177

¹¹¹ Ibid., 178

- 2) Triangulasi Teori, yaitu melakukan *cross-check* antara data dengan teori, sehingga diperoleh kecocokan antara keduanya.
- 3) Triangulasi metode, yaitu melakukan *cross-check* terhadap metode-metode pengumpulan data yang digunakan, sehingga satu sama lain sinkron.
- 4) Diskusi sejawat, dilakukan dengan mengecek hasil penelitian sementara kepada rekan diskusi untuk mendapatkan masukan-masukan perbaikan.
- 5) Konsultasi dosen pembimbing, dilakukan dalam rangka menguji dan menjajaki validitas analisis data, sehingga interpretasi data dapat dilakukan secara lebih baik.

Beberapa langkah yang ditempuh untuk pemeriksaan data adalah sebagai berikut:

1. Mengecek kekuatan sumber data, yang dibedakan antara data primer dan sekunder. Dalam hal ini, penulis mendahulukan data primer.
2. Mengecek data dari pengaruh subjektivitas penulis. Dalam hal ini, penulis akan membedakan antara data objektif dengan data subjektif hasil interpretasi penulis.
3. Melakukan pembobotan bukti dari sumber data-data yang dapat dipercaya.
4. Membuat perbandingan data, khususnya terhadap beberapa informasi yang bertentangan antara sumber data yang satu dengan lainnya.
5. Diskusi interpretasi, yaitu dengan mempresentasikan hasil interpretasi penulis kepada kolega dan selama proses bimbingan kepada dosen.¹¹²

¹¹² Rahmat Sahid, *Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman*, (Semarang: UMS, 2011) (<http://sangit26.blogspot.com/2011/07>).

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dalam lima bab. Bab Pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Urgensi Penelitian, Telaah Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Pada bab ini, penulis memaparkan latar belakang diangkatnya permasalahan dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan sejumlah pertanyaan penelitian yang berfungsi sebagai batasan dan rumusan masalah. Guna memberi arah bagi penelitian ini, maka ditetapkan tujuan dan urgensi penelitian. Untuk mendukung penelitian ini sebagai karya ilmiah, dilakukan telaah pustaka terkait dengan penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Adapun landasan teori adalah untuk memaparkan teori-teori terkait dengan kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu evaluasi kebijakan dan pondok pesantren. Pada bab ini juga dipaparkan metodologi penelitian yang digunakan dan ditutup dengan sistematika penulisan.

Bab Kedua berisi pembahasan tentang Perkembangan Pondok Pesantren di Provinsi Jambi, yang diuraikan dalam sub-bab sebagai berikut: 1) Sejarah Pondok Pesantren di Nusantara, 2) Sejarah Pondok Pesantren di Provinsi Jambi dan 3) Perkembangan Pondok Pesantren di Jambi.

Bab ini memuat pemaparan tentang sejarah pondok pesantren di Indonesia yang muncul sejak periode awal munculnya Islam di Indonesia. Selanjutnya dipaparkan mengenai sejarah Provinsi Jambi sehubungan dengan awal masuknya Islam. Pada akhir abad XIX, dikemukakan cikal-bakal berdirinya pondok pesantren di Provinsi Jambi yang masih berhubungan erat dengan keberadaan Kesultanan Melayu-Jambi.

Bab Ketiga berisi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Pondok Pesantren, yang diuraikan ke dalam empat sub-bab: 1) Perkembangan Kebijakan Pemerintah dari Masa ke Masa, 2) Kebijakan Kementerian Agama, 3) Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

Bab ini mengungkap kebijakan pemerintah di tanah air terkait dengan pondok pesantren, yang dimulai sejak era kolonialisme Belanda, berlanjut ke masa Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Dengan pengungkapan sejarah kebijakan tersebut, dapat dilihat transformasi kebijakan pemerintah terkait dengan pondok pesantren, hingga lahirnya kebijakan Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

Bab Keempat berisi Analisis dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Pondok Pesantren, yang diuraikan menjadi sub-bab sebagai berikut: 1) Kekuatan, 2) Kelemahan.

Bab ini memaparkan evaluasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan pondok pondok pesantren yang merupakan temuan akhir dari penelitian ini.

Bab Kelima berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan, implikasi dan rekomendasi.

Bab ini merangkum hasil penelitian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian pada Bab I, yang dilanjutkan dengan implikasi dan rekomendasi penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perkembangan pondok pesantren di Provinsi Jambi telah berlangsung sejak awal abad ke-20 yang ditandai dengan berdirinya Pondok Pesantren Nurul Iman di Kota Jambi pada tahun 2015. Hingga kini, perkembangan jumlah pesantren telah menjadi 214 lembaga. Berbeda dengan pola pendirian pesantren di Pulau Jawa, pondok pesantren yang awal-awal berdiri di Provinsi Jambi pada umumnya adalah pesantren milik masyarakat yang diserahkan kepemimpinannya kepada seorang tokoh Guru. Dengan pola demikian, maka kepemimpinan pesantren di Jambi tidak bersifat turun-temurun. Hal ini mengandung keunggulan dan kelemahan sekaligus. Keunggulannya adalah terbukanya peluang kepemimpinan yang demokratis. Namun dari segi regenerasi mengandung kelemahan, karena regenerasi yang tidak didasarkan pada garis keturunan dapat berdampak pada lemahnya rasa kepemilikan dan rasa tanggung jawab untuk mengembangkan pesantren dengan penuh loyalitas dan dedikasi. Hal ini ditunjukkan melalui fakta yang terjadi pada PP. Nurul Iman, PP. Sa'adatuddaraen, dan fakta perpecahan kepemimpinan pada PP. Syeikh Maulana Qori dan PPM. Al-Hidayah. Pola itu mengalami perubahan dengan kehadiran alumni-alumni pesantren dari Pulau Jawa untuk mendirikan pesantren di Jambi, terutama sejak tahun 1990-an. Hingga kini, seluruh corak pesantren yang ada di nusantara telah hadir di Provinsi Jambi, mulai dari corak salafiyah, khalafiyah, campuran, dan mu'allimin.
2. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan pondok pesantren di Provinsi Jambi difokuskan pada pengembangan sarana dan prasarana pondok pesantren,

yang ditandai dengan sejumlah bantuan yang mengalir baik dari Kementerian Agama RI, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi bahkan memiliki program Pesantren Mandiri untuk pemberdayaan pondok pesantren. Dari segi program, Kementerian Agama focus pada pengembangan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) 12 Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah, dan Program Indonesia Pintar. Selain itu, Kementerian Agama memiliki kebijakan pengembangan pesantren sebagai pusat *tafaqquh fiddin* sesuai dengan tradisi keilmuan yang dikembangkan sejak awal keberadaannya. Hal tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan MQK Tingkat Nasional pada tahun 2013, dengan motivasi awal pengembangan kitab kuning bagi pondok pesantren di Provinsi Jambi. Akan tetapi kebijakan tersebut mengalami hambatan pada tingkat implementasi kebijakan diakibatkan kurangnya program terkait *tafaqquh fiddin* yang terencana setiap tahun.

3. Kekuatan kebijakan pemerintah dalam pengembangan pondok pesantren di Provinsi Jambi adalah adanya kerjasama koordinatif antara Kementerian Agama dengan Pemerintah Daerah, sehingga dapat melakukan sinkronisasi program dalam pengembangan pondok pesantren. Kerjasama itu terus terpelihara dengan diselenggarakannya kegiatan Halaqah setiap tahun, sehingga terjadi pertemuan-pertemuan yang signifikan bagi upaya koordinasi antar Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan SKPD Provinsi Jambi. Kelemahannya terletak pada pemetaan potensi dan kondisi pondok pesantren di Provinsi Jambi, sehingga program pengembangan yang ada belum dilakukan berdasarkan skala kebutuhan di masing-masing pondok pesantren. Namun kelemahan yang paling menonjol adalah: (1) lemahnya evaluasi terhadap program/kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga pengembangan pondok

pesantren terkesan stagnan akibat program yang bersifat daur-ulang dan minimnya program perbaikan; (2) lemahnya kontinuitas program yang merupakan dampak dari lemahnya evaluasi program. Hal ini terkesan kuat dari program-program nasional yang dilaksanakan dalam skala tiga tahun sekali, di mana tidak disediakan program antara yang dapat menunjang program nasional itu, terutama Pekan Pramuka Santri Nusantara (PPSN) dan Pekan Olahraga dan Seni antar Pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS). Selain itu juga terdapat kelemahan dalam regulasi Pendidikan Diniyah Formal (PDF) di mana satuan pendidikan ini didesain eksklusif bagi pondok pesantren yang memiliki santri 3.000 orang per tahun dalam 10 tahun terakhir, sehingga aspek pemerataan sebagai ciri kebijakan yang baik tidak terpenuhi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, penulis merekomendasikan sebagai berikut:

1. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam dengan kekhususan pada pendidikan *tafaqquh fiddin* berbasis kitab kuning. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan kepada Kementerian Agama agar tetap menjadikan *tafaqquh fiddin* sebagai muatan utama yang menjadi poros bagi segala program/kegiatan pengembangan pondok pesantren, lebih dari upaya pengembangan budaya dan seni, keterampilan, dan teknologi. Hal ini demi menjaga pondok pesantren dari arus globalisasi yang dapat mengancam tradisi pondok pesantren.
2. Program pengembangan semestinya berlangsung secara berkelanjutan (*sustainable*) melalui program/kegiatan

yang bersifat kontinyu, dan bukan melalui program/kegiatan yang eksidental dan berdiri sendiri. Oleh karena itu, program pengembangan pengembangan *tafaqquh fiddin*, olahraga dan seni, dan pramuka bagi santri tidak cukup hanya melalui *Musabaqah Qira'atil Kutub* (MQK), Pekan Olahraga dan Seni Antar Pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS), dan Pekan Pramuka Santri Nusantara (PPSN) yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali, tapi juga harus ditunjang dengan program/kegiatan antara, seperti bantuan, pelatihan dan sosialisasi program terkait.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, penyusunan disertasi ini dapat diselesaikan, dengan harapan dapat member manfaat untuk kepentingan akademik penulis, dan berguna untuk pengembangan pondok pesantren, khususnya di Provinsi Jambi. Kritik, saran dan masukan sangat diharapkan demi perbaikan disertasi ini. Wassalam.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Anderson, James E.. *Public Policymaking*. Cet. ke-7. Texas: Wadsworth Publishing, 2010.
- Anderson, James. *Public policymaking: An introduction*. Boston: Houghton Mifflin Company, 2003
- Risalah Islam Indonesia: Sejarah Islam Nusantara*. Jakarta: Gema Swara Muslim, 2007
- Anonim. “Landasan Teori: Evaluasi Kebijakan”. <http://2frameit.blogspot.co.id>. Juli 2011
- Arifin, H.M.. *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*. Cet. ke-3. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi Modernisasi Menuju Millenium*. Jakarta: Logos, 1999
- Black, James A dan Dean J. Champions. *Metode dan Penelitian Sosial* (terj.). Bandung: Refika Aditama, 2001
- Benda, Harry J.. *Bulan Sabit Dan Matahari Terbit*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980
- Chariri, Anis. *Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2009
- Daulay, Haidar Putra. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007
- Dhofier, Zamakhsyari. *TradisiPesantren*. Jakarta: LP3ES, 1983
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. *Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Islam 2010-2014*. Jakarta: Dirjen Pendis Kemenag RI, 2010
- Dunn, William N.. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Cet. ke-5. Terj. Samodra Wibawa dkk. dari *Public Policy Analysis: An Introduction, Second Edition*. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2003,
- Dye, Thomas. *Understanding Public Policy*. Cet. ke-13. Paris: Lavoisier, 2013,

- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. (Terj.) Aswab Mahasin, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa. Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial dan Dunia Pustaka Jaya, 1983
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: UGM Press, 1980
- Hasbullah. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996
- Hasbullah. *Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Cet. ke-1. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995.
- Hasbullah. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Cet. ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Howlet, Michael dan M. Ramesh. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Cet. Ke-3. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Koentjaraningrat. "Metode Penggunaan Data Pengalaman Individu", dalam Koentjaraningrat (ed.), *Metode-metode Penelitian*, Jakarta: Gramedia, 1977
- Lacey, A. R. . *A Dictionary of Philosophy*, Third Edition. London: Routledge, 2000
- Laswell, Harold D.. *Policy Sciences*. Connecticut: American Elsevier, 1970
- Madjid, Nurcholish. *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina, 1997
- Maksum. *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Masyhuri dan M. Zainuddin. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008
- Miles, Matthew B. dan A Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis (a Source book of New Methods)*. Beverly Hills: Sage Publications, 1984
- Meltsner, Arnold J.. *Policy Analysis in the Bureacracy*. Berkeley: University of California Press, 1976

- Moeleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Muhaimin. *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Nata, Abuddin. *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*. Cet. Ke-1. Jakarta; UIN Jakarta Press, 2006.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1963
- Nawawi, Hadari. *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*. Jakarta: Haji Masagung, 1989
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Nizar, Syamsul. *Sejarah Pendidikan Islam*. Cet. Ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1982
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003
- . *Public Policy Edisi Keempat*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2012
- . *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Poesponegoro, Marwati Djoned. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid IV, Jakarta: Balai Pustaka, 1984
- Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, dalam <http://kbbi.web.id/bijak>
- Said, Muh. dan Junimar Affan. *Mendidik dari Zaman ke Zaman*. Bandung: Jemmars, 1987
- Saleh, Abdul Rachman. *Pendidikan Agama Dan Keagamaan Visi, Misi dan Aksi*. Jakarta: Gemawindu Prakasa, 2000
- Steenbrink, Karel A. dan Abdurrahman. *Pesantren, Madrasah, Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Cet. ke-2. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994
- Sudiyono. *Model Penelitian Evaluasi (Evaluasi Dampak Program*. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, UGM Yogyakarta, 1992

- Sumardi, Mulyanto. *Sejarah Singkat Pendidikan Islam Di Indonesia 1945-1975*. Jakarta: Dharma Bakti, 1978
- Suminto, Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES, 1985
- Syafi'i, Agus. *Pesantren: Dulu dan Sekarang*. Jakarta: Mubarak Institute, 2006
- Wahjoetomo. *Perguruan Tinggi Pesantren: Alternatif Masa Depan*. Jakarta; Gema Insani Press, 1997
- Wiemer, David L, dan Aidan R Vining. *Policy Analysis: Concept and Practice*. New Jersey: Prentice Hall, 1999
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Mahmudah, 1957, 189-198
- Zuhairini dkk.. *Sejarah Pendidikan Islam*. Cet. ke-5. Jakarta: Bumi Aksara, 1997

II. JURNAL INTERNASIONAL

- Lukens-Bull, Ronald A.. "Teaching Islamic Education: Javanese Islamic Education in A Globalizing Era", *Journal of Arabic and Islamic Studies* 3, 2000
- Tan, Charlene. "Educative Tradition and Islamic Schools in Indonesia", *Journal of Arabic and Islamic Studies* (Nanyang Technological University, Singapore), Vol. 14, 2014
- Zuhdi, Muhammad. "The 1975 Three-Minister Decree of The Modernization of Indonesian Islamic Schools", *American Educational History Journal*, Vol. 32, No. 1, 2005

III. JURNAL/ARTIKEL

- Bruinessen, Martin van. "Pesantren dan Kitab Kuning: Pemeliharaan dan Kesenambungan Tradisi Pesantren," *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Umum Qur'an*, Vol III, No. 4 Th. 1992
- Qodri, M.. "Dinamika Pesantren di Kota Jambi", *Media Akademika*, Vol. 25, No. 3, Juli 2010

- Sugiarti, Diyah Yuli. "Strategi Pengembangan Pondok Pesantren dalam Membangun Peradaban Muslim di Indonesia", *Edukasi*, Vol. 3, No. 1, Maret 2011
- Supriadin. "Politik Pendidikan Islam di Indonesia: Analisis Sistem Pendidikan Pesantren dan Madrasah", *El-HiKMAH*, Vol. 8, No. 2, Desember 2014
- Wahid, Abdurrahman. "Pendidikan Islam harus Beragam", *Kedaulatan Rakyat*, 27 Desember 2002
- Widdy SKDI. Sepintas Asal-Usul Kata "Tanah Pilih Pusako Betuah", *Jambi Independen*, 18 Mei 2009

IV. KARYA ILMIAH TIDAK PUBLIKASI

- Bafadhal, Fauzi. *Sejarah Sosial Pendidikan Islam di Jambi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008
- Gultom, Fadly Mart. *Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia (Studi tentang PP Nomor 55 Tahun 2007)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014
- Gunawan, Hendra. *Perkembangan Kontemporer Madrasah Nurul Iman di Kota Jambi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013

V. DOKUMEN

- Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) 27 Desember 1945
- Bappenas. *Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi*, Jakarta: Kementerian BPN/Bappenas, 2013
- Bidang Pekapontren. *Laporan Akuntansi dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi 2012*
- Bidang Pekapontren. *Program Unggulan Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi 2012*
- Depag RI. *Dinamika Pondok Pesantren di Indonesia*. Jakarta: Dit Pekapontren, 2005

- Depag RI. *Pedoman Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Tahun 2004-2009*. Jakarta: Ditjen Bagais, 2004
- Depag RI. *Profil Pondok Pesantren: Mu'adalah*, Jakarta: Ditjen Bagais, 2004.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi, Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Provinsi Jambi
- Ditjen Pendidikan Islam. *Rencana Strategik Pembangunan Pendidikan Islam 2010-2014*
- Ditpontren. "PDF Solusi Kelembagaan Permanen untuk Kaderisasi Ulama", dalam <http://ditpdpontren.kemenag.go.id/berita>.
- Hasan Basri Agus. *Komitmen Pemprov Jambi terhadap Pembangunan dan Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam di Provinsi Jambi*, 2014
- Husaini, Haviz. *Agenda Pembangunan Daerah di Bidang Agama*. Jambi: Setda Provinsi Jambi, 2013
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. *Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi 2010-2014*
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, *LAKIP Bidang PAKIs Tahun 2011*
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. "Kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tentang Pondok Pesantren Salafiyah". Jambi: 2012
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. *Juknis MQK Nasional di PP As'ad*. Jambi, 2014
- Kementerian Agama RI. *Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah pada Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2015*. Jakarta: Ditjen Pendis, 2015
- Kementerian Agama RI. *Renstra Pendidikan Islam Tahun 2015-2019*. Jakarta: Ditjen Pendis, 2015
- Keputusan Gubernur Jambi Nomor 238/Kep.GUB/B.Kesramas/2013 tentang Penetapan Pondok Pesantren yang Akan Dikembangkan untuk Menjadi Pondok Pesantren Mandiri dalam Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2013-2017

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5839 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal

KMA (Keputusan Menteri Agama) Nomor 373 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi Jambi, “Sejarah berdirinya Provinsi Jambi”, <http://jambiprov.go.id>

Penjelasan PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam

Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Ma’had Aly

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2011-2015

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

VI. WEB

Erman Aminullah. “Desain Penelitian Kebijakan”, makalah LIPI diakses Mei 2015. <http://ajisofanudin.blogspot.co.id>,

Banset, Manju. *What Is Critical Research Paradigm?*. Diakses Mei 2011. <http://manju-basnet.blogspot.com> ()

Bappenas. *Petunjuk Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019*. www.bappenas.go.id

Buwono, Hamemayu H.. *Sejarah dan Asal Muasal Provinsi Jambi*, <https://oediku.wordpress.com>

- Cohen D, Crabtree B. *Critical Theory Paradigms*. Diakses Juli 2006. www.qualres.org
- Gultom, Fadly Mart. *Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia (Studi tentang PP Nomor 55 Tahun 2007)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014
- Gunawan, Hendra. *Perkembangan Kontemporer Madrasah Nurul Iman di Kota Jambi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013
- Kementerian Agama RI. “Pendidikan Islam dalam Agenda Kebijakan Pemerintah Daerah: Survey Opini Pemangku Kepentingan”, www.kemenag.go.id
- Kemenag.go.id., “Pendidikan Islam dalam Agenda Kebijakan Pemerintah Daerah: Survey Opini Pemangku Kepentingan”, www.kemenag.go.id
- M. Haromain dan Mahbib. “Dua Kehebatan Muslim Nusantara Menurut Prof. Yudian”. Diakses 14 Februari 2016. nu.or.id ()
<http://ditpdpontren.kemenag.go.id/berita/pendidikan-diniyah-formal-pdf-solusi-kelembagaan-permanen-untuk-kaderisasi-ulama/>
- Machali, Imam. “Kebijakan Pendidikan Islam dari Masa ke Masa: Dari Kebijakan Diskriminatif Menuju Kebijakan Berkeadilan”. Arfa_umgblogger.com
- Markus, Sudiby. *Pro-Kontra Sisdiknas dan Politik Kristenisasi* (<http://www.mail-archive.com/rantau-net@groups.or.id>)
- Muadz, Amali. *Sejarah Perkembangan Pesantren di Jambi*, <http://www.amali-muadz.com>, 2011
- Muklir. “Evaluasi Kebijakan Publik”, dalam <http://xpresipena.blogspot.co.id>, 8 November 2011
- Pemerintah Provinsi Jambi, “Sejarah berdirinya Provinsi Jambi”, <http://jambiprov.go.id>
- Fiki Porniadi. “Evaluasi Kebijakan”, dalam <http://fikiporniadi.blogspot.co.id>, 29 April 2014
- Rahardjo, Mudjia. *Pengantar Analisis Kebijakan Pendidikan*. <http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id>, 1 Februari 2010
- Rohyati. “Evaluasi Kebijakan Publik”. <http://rochyati-w-t-fisip.web.unair.ac.id>

Rusta, Andri. “Impelementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik”.
fisip.ilearn.unand.ac.id

Rahmat Sahid. *Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman*.
Semarang: UMS, 2011, <http://sangat26.blogspot.com>, Juli 2011

**DAFTAR PONDOK PESANTREN DI PROVINSI JAMBI
TAHUN 2007**

No	Nama Pondok Pesantren	Alamat	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Nama Pimpinan
		5	6	7	8
1	PPs. Jami'atul Ikhsaniyah Mukhtariyah	Ambai Bawah	Sitinjau Laut	Kerinci	KH. Ahmad Mukhtar, BA
2	PPs. Nurul Haq	Air Tenang Semurup	Air Hangat	Kerinci	Darul Ulum
3	PPs. Hataksa	Jl. Wisata Air Panas Semurup	Air Hangat	Kerinci	Amir Yunus, S.Ag, S.Pd
4	PPs. Darunnajah	Bumbun Duri	Gunung VII	Kerinci	Suyono, S.Pd I
5	PPs. Raudhatul Ulum	Bedeng Delapan	Kayu Aro	Kerinci	Drs. H. Sunarto
6	PPs. Al-Kahfi	Pelompek	Gunung VII	Kerinci	H. Inal Aprizal, Lc. S.PdI
7	PPs. Al-Muhsinin	Koto Petai	Danau Kerinci	Kerinci	Ahmad Rais, S.Ag, M.Pd I
8	PPs. Al Munawwaroh	Bangko	Bangko	Merangin	KH. Sofwan, S.Ag, M.Pd
9	PPs. Al Mujahadah	Jl. Patimura Rt. 29	Bangko	Merangin	M. Dahlan Abdullah
10	PPs. Syekh Maulana Qori	Desa Titan teras	Batang Masumai	Merangin	KH. Satar Saleh
11	PPs. Al Islah	Danau Pauh	Jangkat	Merangin	Zulfikar
12	PPs. Assalamah	Desa Sukorejo	Margo Tabir	Merangin	Ust. Sukardi, S.Pd.I
13	PPs. Subulussalam	Jl. Bangko-Ma.Siau KM. 38	Muara Siau	Merangin	M. Haizir Kamza
14	PPs. Mamba'ul Ulum	Desa Limbur Merangin	Pamenang Barat	Merangin	Tengku Iskandar Manaf
15	PPs. Azzakariyah	Desa Muaro Panco Timur	Renah Perbarap	Merangin	Drs. A. Kadir. N
16	PPs. Nurul Yaqin	Jl. Bangko-Kerinci KM 42	Sungai Manau	Merangin	KH. Ahmad Sobri
17	PPs. Nurul Falah	Jl. Sutan Senaro Nigaol	Tabir Barat	Merangin	Agusri. A
18	PPs. Al-Munawwaroh	Desa Muaro Langeh	Tabir Barat	Merangin	H. Lukman Hakim, S.Pd.I
19	PPs. Darul Qur'an Al Irsyadiyah	Jl. Lintas Sumatera KM 20	Tabir Lintas	Merangin	Salman Arsyad, SQ
20	PPs. Al Hidayah	Desa Bungo Antoi	Tabir Selatan	Merangin	Slamet Mustari
21	PPs. Al Hafiz	Jl. Onto Seno	Tabir Selatan	Merangin	Ust. Muh. Syukron
22	PPs. Al Istiqomah	Jl. Sambu	Tabir Selatan	Merangin	Ahmad Saefuddin
23	PPs. Haqqul Yaqin	Desa Muaro Panco Timur	Renah Perbarap	Merangin	H. Ahmad Fahri
24	PPs. Syayyid Musthafa	Rantau Panjang	Tabir	Merangin	Ust. Mukhtar, HA
25	PPs. M. Amin Rajo Tiangso	Desa Talang tembago	Sungai Tenang	Merangin	Drs. H. Ibnu Hajar
26	PPs. Darul Fiqih	Desa Koto Baru Seling	Tabir	Merangin	Drs. Abdullah

1	2	3	4	5	6	7	8
27	PPs. Darul Muhaajirin	Desa Tanjung Mudo			Pangkajene Jambu	Merangin	KH. Abu Bakar
28	PPs. Nurul Athfal	Desa Limbur Merangin			Pameang Barat	Merangin	TGK. Ahmad Fauzi
29	PPs. Darussalam	Desa Pulau Baru			Batang Masumai	Merangin	Syarif Hidayatullah
30	PPs. Darussalam	Kel. Pasar Pameang			Pameang	Merangin	Syaparudin
31	PPs. Depati Agung	Desa Pulau Raman			Muara Siau	Merangin	Ust. Solihin, S.Pd.I
32	PPs. Sulthan Fattah	Desa Tambang Emas			Tabir Selatan	Merangin	Ust. Mukhlisin
33	PPs. Asy'ariyah	Desa Muaro Parco timur			Renah Pembatap	Merangin	KH. Sya'fi
34	PPs. Nurul Iman	Desa Badak Terkurung			Muara Siau	Merangin	Awwar Anas
35	PPs. Jauharussa'adah	Desa Part Ujung Tanjung			Renah Pembatap	Merangin	Abi Wakas
36	PPs. Darul Adiq	Maskita Karya Pasar Atas			Bangka	Merangin	H. Mukhtar Aldin, LC
37	PPs. Bustanu 'Usyraqil Qur'an	Desa Pinang Merah			Pameang Barat	Merangin	M. Aris Mu'tolohar Al-Hafifh
38	PPs. Lebayasin	Desa Titian teras			Batang Masumai	Merangin	H. Ahmadi, S.Th.I
39	PPs. Darul Ikhlas Al-Islami	Desa Tambang Baru			Tabir Lintas	Merangin	KH. Junaidi
40	PPs. Darul Muttaqien	Desa Pauh Menang			Pemeang	Merangin	Sholikin
41	PPs. Darul Ishlah	Simp. Tihan Anoi Kel. Dusun Baru			Tabir	Merangin	Ust. Mat Fahmi
42	PPs. KH. Abdul Satar Saleh	Desa Renah Medan			Renah Pembatap	Merangin	KH. Abdul Satar Saleh
43	PPs. Darul Mu'alla	Sungai Ulak			Nalo Tantan	Merangin	Hudri Umar, S.Pd.I
44	PPs. Rahmatan Lil 'Alamin	Durian Luncuh			Sungai Manau	Merangin	Azwardi, S.H.I, M.H.I
45	PPs. Al-Hidayah	Rimba Kartika			Tabir	Merangin	Agus Sugiaro
46	PPs. Al Ma'arif NU	Desa Muaro Langit			Tabir Barat	Merangin	Afrizal, S.Pd, M.Pd.I
47	PPs. Bismillah	Desa Mekar 5 Manis			Tabir Ilir	Merangin	Aswani
48	PPs. Madinatul Ulum	Kel. Pemeang			Pemeang	Merangin	H. Abdul Khoilik, LC, M.Fil I
49	PPs. Al Anwar	Part. Panji, Serdang Jaya			Betara	Tanjab Barat	K. M. Rusdy
50	PPs. Marfatihl Huda	Dusun Karya Jaya			Betara	Tanjab Barat	H. Zahrowi Tohir, AM, a
51	PPs. Riyadul Jannah	Sungai Daulap			Betara	Tanjab Barat	KH. Ahmad Zeumuri
52	PPs. Mustapa Tsani	Jl.Lintas Timur			Merung	Tanjab Barat	H.M. Samusi, HS
53	PPs. Darul Uloom	Sungai Dangun			Pengabuan	Tanjab Barat	Syamsul Hadi Ihsan, S.Pd.I
54	PPs. Al Baqiyatush Shalihat	Jl.Prof.DR. Sri Soedewi/MS			Tungkal Ilir	Tanjab Barat	KH. Abdul Hamid Kurmanin
55	PPs. Al Hidayatul Islamiyah	Jl.K.H.A.Wahab			Tungkal Ilir	Tanjab Barat	KH. Abd. Halim Kasim, S.H
56	PPs. Saadatul Abadiyah	Jl. K Hajar Dewantara Part II			Tungkal Ilir	Tanjab Barat	Ahmad Hamrawi, S.Ag
57	PPs. Raudlatussalaif	Jl.Peraire Tendean			Tungkal Ilir	Tanjab Barat	Ahmad Makki

1	3	5	6	7	8
58	PPs. Nurul Istiqomah	Jl. Bangau I Desa Suka Damai	Tebing Tinggi	Tanjung Barat	Misnari
59	PPs. Istidaatul Muallimin	Perit No 14 Parit Pudin	Pengabuan	Tanjung Barat	M. Nasir
60	PPs. Nurul Ikhlis	Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi, M.HS	Tungkal Ilir	Tanjung Barat	Drs .H.M. Khairuddin, M.Pd.I
61	PPs. Fathul Ulum	Jl. Pasar Baru KM. 2,5	Tebing Tinggi	Tanjung Barat	Ibnu Hajar
62	PPs. Ihyausunnmah	Desa Teluk Serdang	Betara	Tanjung Barat	Taufiqurrahman
63	PPs. Mau'izah	Desa Senyerang	Senyerang	Tanjung Barat	Abdul Muthalib HAR
64	PPs. Darussalam	Desa Senkati Baru	Mersam	Batanghari	K. Ridwan Yahya
65	PPs. Masdarul Hikam	Desa Sungai Pulai	Muara Tembesi	Batanghari	KH. Roziqin Mustafa
66	PPs. Nurul Jadid	Desa Rambutan Masam	Muara Tembesi	Batanghari	KH. Syamsudin Ali
67	PPs. Nurul Ihsan	Desa Empelu Mudo	Muara Tembesi	Batanghari	KH. M. Haris Siregar
68	PPs. Al Falah	Desa Malapari	Muara Bulian	Batanghari	Dra. Matsyarah
69	PPs. Al Muhajirin	Desa Sempang Terusan	Muara Bulian	Batanghari	KH. M. Hafidz
70	PPs. Darul Au'fa	Desa Sungai Buluh	Muara Bulian	Batanghari	KH. Zuhdi Al-Mijri
71	PPs. Darul Qur'an	Kelurahan Sridadi	Muara Bulian	Batanghari	K. Lutfillah Baidawi
72	PPs. Zulhijjah	Kelurahan Teratai	Muara Bulian	Batanghari	KH. Lohot Hasibuan
73	PPs. Darussyafiyah	Desa Rantau Puri	Muara Bulian	Batanghari	KH. Muid Syofi
74	PPs. Manarul Huda	Desa Kilangan	Muara Bulian	Batanghari	K. Ahmad Kholid
75	PPs. Al Irsyadiyah	Desa Sempang Jelutih	Batin XXIV	Batanghari	K. Nasruddin
76	PPs. Irsyadul Ibad	Desa Simp. Klub Kandang	Pemayang	Batanghari	KH. Royani Jamil
77	PPs. Mambaul Huda	Kelurahan Jembatan Mas	Pemayang	Batanghari	K. Ngalimun
78	PPs. Darul Ikhwan	Desa Danau Embat	Maro Sebo Ilir	Batanghari	KH. M. Amin, MA
79	PPs. Ummul Masakin	Desa Rantau Puri	Muara Bulian	Batanghari	Dra. Tiaman
80	PPs. Arrahman Tahtidz	Kelurahan Rengas Condong	Muara Bulian	Batanghari	H. Rahman, S.H.I
81	PPs. Darul Hijrah	Kelurahan Sempang Sungai Rengas	Maro Sebo Ulu	Batanghari	Mukhlis
82	PPs. Raudhatul Muhajirin	Ds Tangkit Baru	Sei. Gelam	Muaro Jambi	Drs. H.M. Yunus
83	PPs. Al-Mutaqin	Ds Ibru	Mestong	Muaro Jambi	M. Ya' cub Mubarak
84	PPs. Al-Ikhwan	RT.21 Kebon IX	Sei. Gelam	Muaro Jambi	K. Abdul Aziz
85	PPs. An-Najah	Jl.Lintas Timur Sengeti	Sekernan	Muaro Jambi	Dra. Cakaria
86	PPs. Nurul Iman	Ds Sebapo	Mestong	Muaro Jambi	Muhammad Arif
87	PPs.Hidayatullah	Ds Bukit Baling	Sekernan	Muaro Jambi	M.Arief Abidin, S.Pd.I

1	2	3	4	5	6	7	8
88	PPs. Al-Busyra	Jl Suak kandi KM 62			Kumpeh	Muaro Jambi	Dr. KH. Abdul Kadir Sobur
89	PPs. Miftahul Ulum	Ds Petaling Jaya			Sei. Gelam	Muaro Jambi	Amrin Husin
90	PPs. Al-Faqih	Jl Pesantren Rt. 12			Kumpeh Ulu	Muaro Jambi	KH Taufik Al-Haddad
91	PPs. An-Nur	Desa Tangkit			Sei. Gelam	Muaro Jambi	DR.KH.Marwazi, MA
92	PPs. Bustanu Ulum	Desa Panca Mulya			Sei. Bahar	Muaro Jambi	Juli Misbach, S.Pd.I
93	PPs. Choitbul Islam	Desa Bahar Mulya			Bahar Utara	Muaro Jambi	Ahmad Karim, S.Ag
94	PPs. Darul Ulum	Jl. Jambi-Muaro Piloan			Jatuko	Muaro Jambi	KH. Muzaki
95	PPs. Insan Istiqomah	Desa Simpang Sei. Duren			Jatuko	Muaro Jambi	Mustafau Sunnyah, M.Pd.I
96	PPs. Al-Anwar	Rt.02 Desa Petarang			Kumpeh	Muaro Jambi	Asrofi Asror, S.Pd.I
97	PPs. Al-Quran Assalafiyah	Jl Lintas Talang Belido			Sei. Gelam	Muaro Jambi	Imam Muchtar
98	PPs. Baitul Karomah	Jl.Mandiri Rt. 09 R/w 02			Kumpeh Ulu	Muaro Jambi	Ali Mahmudi
99	PPs. Nurul Hasanah	Desa Sei.Gelam			Sei. Gelam	Muaro Jambi	H. Nuridin
100	PPs. Jaurahul Falah Al-Islamy	Jl.Jambi Suak Kandi km 19			Kumpeh Ulu	Muaro Jambi	Toni Fadhlyansyah, S.Pd.I
101	PPs. Riyadatul Amlen	Desa Muaro Jambi			Maro Sebo	Muaro Jambi	Margutin, A.Ma
102	PPs. Ma'had Muaro Kumpeh	Desa Muaro Kumpeh			Kumpeh	Muaro Jambi	Solahudin
103	PPs. Al-Baroah	Desa Kasang Puduk Rt. 34			Kumpeh Ulu	Muaro Jambi	K. Asmual
104	PPs. Azizah	Jl.Buger RT.14/05			Sei. Gelam	Muaro Jambi	Hj.Aslin Sunyoto
105	PPs. Darun Najah	Desa Simp. Tempino Mestong			Mestong	Muaro Jambi	Sisworo s
106	PPs. Kasyyful Ulum	RT. 11 Desa Kebon IX Mestong			Sei. Gelam	Muaro Jambi	H. Zakaria Laut, M.Fil I
107	PPs. Serambi Makah	Jl. Poros Asiatik RT. 04 Desa Bakti Mulya			Sei. Bahar	Muaro Jambi	Masnun Haqi, S.Pd.I
108	PPs. Darul Quran Al-Martuh	Desa Parit			Sei. Gelam	Muaro Jambi	
109	PPs. Darul Fikri	Jl. Jambi-Palembang KM. 34 Desa Sei. Landai			Mestong	Muaro Jambi	Martuah, S.Pd.I
110	PPs. Bahrul Ulum	Desa Trimulya Jaya			Sei. Gelam	Muaro Jambi	Khoirul
111	PPs. Sabtilu Ikhlas Al-Mubarak	Jl. Lintas Timur Jambi-Palembang Desa Sehapo			Mestong	Muaro Jambi	Ir. H. Yehartati Musa
112	PPs. Mamba'ul Ulum	RT 11 Talang Bakung			Jambi Selatan	kota Jambi	Siameet Baharuddin
113	PPs. Ainul Yaqin	Jl. Batam RT 25/02 L. Bandung			Jelutung	kota Jambi	Abdullah Syafandi
114	PPs. PPM Al-Hidayah	Jl. Marsda Surya Darma KM. 10			Kota Baru	kota Jambi	Drs. Ahmad, MM
115	PPs. As'ad	Jl. KH. A. Qodir Ibrahim No.45			Danau Teluk	kota Jambi	H.M. Najmi Qadir Ibrahim
116	PPs. Nurul Iman	Jl. KH Ibrahim RT 08 Kel. Ulu Gedong			Danau Teluk	kota Jambi	H. Fahrudin Rozi, SH.
117	PPs. Al Jauharein	Jl. KH. A. Majid RT 04 TJ Johor			Pelayangan	kota Jambi	Gr. H. Srojuddin Muhammad
118	PPs. Al Riyadh	Jl. KH. A. Ma'id RT 04 Kel.TJ Johor			Pelayangan	kota Jambi	Ahmad Riad Azra'i, S.Pd.I

1	3	5	6	7	8
119	PPs. Darul Muhtadin	Jl. KH. A. Somad Kel. Arab Melayu	Pelayangan	Kota Jambi	H. Saïd Ali Abdurrahman Al-Jufri
120	PPs. Ma'had Al-Mubarak	Jl. KH. Temenggung Jakfar Kel.Tahtul Yaman	Pelayangan	Kota Jambi	H. Mubarak HM. Daud Al-Hafiz
121	PPs. Sa'adatuddaren	Jl. KH. Temenggung Jakfar Kel.Tahtul Yaman	Pelayangan	Kota Jambi	H. Helmi Abdul Majid
122	PPs. Tahfiz Darul Hikmah	Jl. R. B Siagian RT.11 Kel. Pasir Putih	Jambi Selatan	Kota Jambi	H. Abdurrozaq
123	PPs. Al-Hidayah	Kel. Aur Gading	Sarolangun	Sarolangun	M. Mirza, S.Ag
124	PPs. Al-Fatah	Desa Payo Lebar	Singkut	Sarolangun	Hajar Saputra, S.Sos I
125	PPs. Nurul Jadid	Desa Pasar Singkut	Singkut	Sarolangun	Imam Hambali
126	PPs. Salaful Muhajirin	Desa Bukit Murau	Singkut	Sarolangun	Roffi Ahmad, M.Pd.I
127	PPs. Assalamah 45	Desa Pelawan	Pelawan	Sarolangun	HM. Kamil Hamid
128	PPs. Al-Manar	Desa Karang Mendapo	Pauh	Sarolangun	Abdullah Sofi
129	PPs. Nurul Huda	Desa Mandi Angin	Mandiingin	Sarolangun	Rois Amin, S.HI
130	PPs. Assafi'iyah	Desa Laut Kesadu	Pauh	Sarolangun	K. Abdul Kodir
131	PPs. Wali Songo	Desa Bukit Tigo	Singkut	Sarolangun	Zainal Abidin
132	PPs. Darul Aulia	Desa Bukit Tigo	Singkut	Sarolangun	H. Zulkarnain
133	PPs. Ihya Ulumiddin	Desa Guru Baru	Mandiingin	Sarolangun	Ust. Wafir
134	PPs. Ihya ul Ulum	Desa Batu Putih	Pelawan	Sarolangun	Ahmad Munir Sarja
135	PPs. Hafiz Al-Fatah	Desa Teluk Kecimbung	Bathin VIII	Sarolangun	Saleh Hafiz
136	PPs. Nida'ul Quran	Desa Tanjung	Bathin VIII	Sarolangun	Azra'i Abbas
137	PPs. Atazkiya	Desa Sungai Benteng	Singkut	Sarolangun	Ali Rifan
138	PPs. Darussalam	Desa Muaro Cuban	Batang Asai	Sarolangun	A. Nasution
139	PPs. Al-Ikhwaniyah	Desa Baru	Air Hitam	Sarolangun	Ahmad Ikhwani
140	PPs. Kanjeng Sepuh	Desa Kertopati	Mandiingin	Sarolangun	Bahir,S.Pd.I
141	PPs. Salafiyah Assafi'iyah	Desa Sei. Benteng	Singkut	Sarolangun	Yazid Syafi'i
142	PPs. Babussalam	Desa Mentawak Baru	Air Hitam	Sarolangun	Ust. Irfan
143	PPs. Nurussalam	Desa Semarang	Pauh	Sarolangun	Teguh Siswanto
144	PPs. Miftahul Ullum	Desa Sungai Merah	Pelawan	Sarolangun	K.Asyhari Munawar
145	PPs. Rahmatul Ummah	Padang Birau SRL	Sarolangun	Sarolangun	Ust. Samsul Huda
146	PPs. Al-Ma'arif	Desa Sungai Merah	Pelawan	Sarolangun	Hendra, S.Ag
147	PPs. Al-Kholifah	Desa Teluk kecimbung	Bathin VIII	Sarolangun	Mahjili, SE
148	PPs. Miftahul Huda	Desa Kampung VII	Germin Nan Gedang	Sarolangun	Sumadi

1	2	3	4	5	6	7	8
149	Pps. Al-Muballighin			Kelurahan Bungo Timur	Pasar Muara Bungo	Bungo	Syafrizal, S.Ag, M.Pd.I
150	Pps. Nurul Haq			Desa Lubuk Mayan	Rantau Pandan	Bungo	H. Rosyid Ali Ridho, S.Pd.I
151	Pps. Darussalam			Lintas Sumatera KM 19	Tanah Sepenggal Lintas	Bungo	Ust. DR. Ahmad Basri, M.Si
152	Pps. Hidayatul Mukhtadi'in			Ds. Sekar Mengkuang	Limbuk Lubuk Mengkuang	Bungo	Ach. Zubaidi
153	Pps. Ithhadul Ummah			Pekan Jumat Bedaro	Muko Muko Batih VII	Bungo	Janhuri
154	Pps. Tarbiyah Islamiyah			Jl.Cempaka II Tj.agung	Muko Muko Batih VII	Bungo	H. Abdu Muthofin, S.Ag
155	Pps. Miftahul Huda			Jl. Batang Hari Purwasari	Pelepat Ilir	Bungo	K. H. Zainuddin AS
156	Pps. Zumatul Ikhwan			Sungai Beringin	Pelepat	Bungo	Chairul Anri
157	Pps. Al Falah			Pasir Putih Muara Bungo	Bungo Dari	Bungo	Aswan, S. Pd.I
158	Pps. Dinayah			Jln.Batang Hari Perumnas	Rimbo Tengah	Bungo	Dra. Hajjah Rosmaini, M.Pd.I
159	Pps. Al Ikhlas			Jl. Sungai Arang	Bungo Dari	Bungo	K.H. Inam Qusyairi, S.Pd.I
160	Pps. Raudhatul Ulum			Sungai Pinang Muara Bungo	Bungo Dari	Bungo	Endang Wiwik Handayani, SE
161	Pps. Al Kautsar			Jl Rio Duya RT 03 Ds Babeko	Batih II Babeko	Bungo	Syamsul Arabiah, AT
162	Pps. Babul Muarriif			Kampung. Baru Sei Telang	Batih III Ulu	Bungo	Amri, S.Pd.I
163	Pps. Nurul Islam			BTN Sei Mengkuang	Rimbo Tengah	Bungo	Taqi Marwah, S.Pd.I
164	Pps. Ashabul Kahfi			Lubuk Landai	Tanah Sepenggal Lintas	Bungo	Drs. H. Hasanuddin, M.Pd. I
165	Pps. M. Tho'ha Al Fasyri			Lts. Sumatera KM 25 Sei Gurun	Pelepat	Bungo	Ust. Marsu'rn
166	Pps. Qiro'atul Qur'an			Sungai Binjai	Batih III	Bungo	Ridwan
167	Pps. Darussalam			Ds. Rantau Panjang	Jujuhan	Bungo	M. Nazir
168	Pps. AlHidayah			Ds. Bukit Telago	pelepat	Bungo	Sulainan
169	Pps. Tahfidzul Qur'an Ummul Quro			Ds. Rantau Duku	Rantau Pandan	Bungo	Drs. Baihaki
170	Pps. Darul Ulum			Desa Aur Gading	Jujuhan Ilir	Bungo	H. Mubshin, Lc
171	Pps. Al-Ayubi			Desa Sungai Terang	Batih III Ulu	Bungo	Harlek
172	Pps. Latansa			Desa Rantau Godang	pelepat	Bungo	M. Yusri, S.H.I
173	Pps. Nurul Jalal			Km.02 Muara Tebo	Tebo Tengah	Tebo	KH. Fauzi Mansyur
174	Pps. Darul Muttaqin			Desa Simpang Pelayang	Tebo Tengah	Tebo	Ust. Khusairi, S.Ag
175	Pps. Bustanul Huda			Jln. Padang Lama Desa Pagar Puding	Tebo Ulu	Tebo	Ust. Lukman
176	Pps. Riadushalihin			Dusun Pulau Jelmu Desa Bungo Tanjung	Tebo Ulu	Tebo	H.M. Yunus
177	Pps. Minhajul Ishlah			Desa Jambu	Tebo Ulu	Tebo	K. Junaidi S.Ag
178	Pps. Al-Hariri			Betung Bedarah Barat	Tebo Ilir	Tebo	Ust. Suhairi, S.Pd.I
179	Pps. Raudhatul Ulum Al-Ittiqiyah			Desa Lubuk Wandarah	Tengah Ilir	Tebo	K. Ahmad Setiadi

1	3	5	6	7	8
180	PPs. Baabussalam	Simpang Niam Desa Mangupeh	Tengah Ilir	Tebo	Ust. Anwar Musaddad
181	PPs. Al-Inayah	Jln Lesmana Desa Perintis	Rimbo Bujang	Tebo	KH. Rifai Abdullah
182	PPs. Chirzaaddin	Jln 04 Desa Perintis	Rimbo Bujang	Tebo	K. Maknun
183	PPs. Nurul Huda	Jln 24 Desa Perintis	Rimbo Bujang	Tebo	Hj. Nurhayati
184	PPs. Darul Ulum	Jln. Merak Unit VII	Rimbo Bujang	Tebo	KH. Aris Kamaluddin
185	PPs. Darussalam	Jln.14 Tegal Arum Unit V	Rimbo Bujang	Tebo	KH. Faig Saipuddin
186	PPs. Raudhatul Mujaawridin	Jln. Meranti Timur Unit VI	Rimbo Bujang	Tebo	KH. Burhan Jamil
187	PPs. Assalam	Jln. Pahlawan Wirotho Agung Unit II	Rimbo Bujang	Tebo	KH. Ajaz Ajiz BA
188	PPs. Nurul Jadid	Jln. KH. Ahmad Dahlan Wirotho Agung	Rimbo Bujang	Tebo	K. Irfan Kasturi
189	PPs. Darul Falah	Jln. Sulthan Thaha Rimbo Bujang	Rimbo Bujang	Tebo	K. Amin Zubaedi, S.Pd.I
190	PPs. Fathul Huda	Jln. Rampai Desa Suka Damai	Rimbo Ulu	Tebo	K. Muhajir
191	PPs. Darul Hikam	Jln. Teratai Desa Suka Damai Unit IX	Rimbo Ulu	Tebo	KH. Rifai Ahmad
192	PPs. Hidayatul Mubtadlin	Jln. Lawu Desa Suka Maju	Rimbo Ulu	Tebo	K. M. Shoim
193	PPs. Al Anshor	Jln. Pesantren Pintas Ambacang Gedang	Muara Tabir	Tebo	K. Nazori Toyib
194	PPs. Annizomiyah	Jln. Padang Lama Km. 280 Desa Aur Cino	VII Koto	Tebo	Ust. Tun Idrumun, S.Pd.I
195	PPs. Tahfizul Qur'an	Jln. Sarifah Alam Desa Paseban	VII Koto Ilir	Tebo	K. Muawiyah
196	PPs. Al-Makkiyah	Simp. Raya Rantau api	Tengah Ilir	Tebo	Ust. Rovicky, S.Pd.I
197	PPs. Ar-Riyadh	Kel. Wirotho Agung	Rimbo Bujang	Tebo	Ust. Ahmad Mufi Mubarak
198	PPs. Tahfizul Qur'an Nurul Falah	Jl. A Yani Desa Tegol Arum	Rimbo Bujang	Tebo	Ust. Nurmansyah, S.Pd
199	PPs. Terpadu Al-Kautsar	Jl. Danau Tanduk KM.07 Lintas Tebo - Bungo	Tebo Tengah	Tebo	Ust. Basir, S.Ag, M.Pd.I
200	PPs. Al-Amanah	Jl. Pendowo Desa Purwoharjo	Rimbo Bujang	Tebo	Ust. Ahmad Muhlis Tamami
201	PPs. Amanatul Ummah	Jl. Dewi Sartika Kel. Wirotho Agung	Rimbo Bujang	Tebo	Ust. Abd Karim Thoyib, S.H.I
202	PPs. Riyadhus Sholihin	SK. 16 Bandar Jaya	Rantau Rasau	Tanjab Timur	Ky. Moh. Izuddin
203	PPs. Al-Hidayah	SK. 21 Bangun Karya	Rantau Rasau	Tanjab Timur	Ky. A. Dahlan
204	PPs. Wali Peetu	RT. 04 Air Hitam Laut	Sadu	Tanjab Timur	K.H. As'ad Arsyad, M.Ag
205	PPs. Nurul Huda	Parit 03 Tanjung Solok	Kuala Jambi	Tanjab Timur	Ky. Ihsan Hidayatullah
206	PPs. Hidayatul Falah	SK. 14 Bandar Jaya	Rantau Rasau	Tanjab Timur	Ky. Maghfurin Mubaid
207	PPs. Riyadul Muttaqin As'adiyah	Sei. Tawar Mendahara Tengah	Mendahara	Tanjab Timur	K.M. Sirajuddin, S.HI
208	PPs. Al-Islah	Parit 10 Teluk Majelis	Kuala Jambi	Tanjab Timur	K.H. Maksum
209	PM. Darussalam Gontor 12	Parit Culum I Muara Sabak Barat	Ma.Sabak Barat	Tanjab Timur	Ust. Salis Masruhin, S.Th.I
210	PPs. Hidayatul Mubtadi-ien	Parit Boom Nipah Panjang	Nipah Panjang	Tanjab Timur	Ust. Muslihuiddin. CH

1	3	5	6	7	9
211 PPs. Moderen Arifah		Jl. Pancasila No. 5	Sungai Penuh	Sungai Penuh	Drs. Bustami
212 PPs. Al-Fath		Desa Sandaral Game	Kumun Debai	Sungai Penuh	Dr. Apendi
J U M L A H					